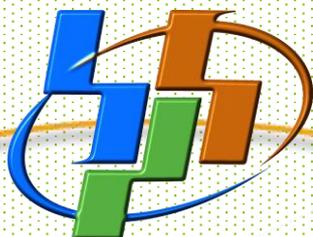


INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT

KABUPATEN LAHAT 2020



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN LAHAT**

KATA PENGANTAR

Publikasi “**Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Lahat Tahun 2020**” memuat berbagai data dan informasi tentang perkembangan kondisi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lahat yang disajikan dalam bentuk indikator kuantitatif bidang sosial.

Melalui data dan indikator sosial tersebut akan dapat diketahui gambaran mengenai perubahan kondisi kesejahteraan masyarakat sebagai dampak dari hasil pembangunan sosial dan ekonomi di Kabupaten Lahat. Informasi ini sangat diperlukan sebagai bahan evaluasi capaian program pembangunan yang telah dilaksanakan, sekaligus sebagai acuan untuk membuat berbagai perencanaan pembangunan sosial ekonomi di masa yang akan datang.

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan publikasi ini, disampaikan terima kasih. Semoga data yang disajikan dalam publikasi ini dapat memenuhi semua keinginan para pengguna data. Kritik dan saran yang membangun dari semua pihak merupakan masukan yang berharga guna perbaikan publikasi ini di masa yang akan datang.

Lahat, November 2020

**Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Lahat**

Ir. Hj. Chairanita K, M.Si

<https://lahatkab.bps.go.id>

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bangsa Indonesia memiliki keberagaman suku bangsa dengan beraneka ragam kondisi sosial dan ekonomi. Cita-cita bangsa Indonesia adalah mewujudkan negeri dan bangsa yang sejahtera, mandiri, demokratis dan adil. Dalam perjalanan mewujudkan cita-cita tersebut dibutuhkan suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur capaian cita-cita tersebut dari rangkaian satuan waktu. Dibutuhkan suatu indikator yang dapat menggambarkan mengenai perkembangan kondisi suatu bangsa baik sosial maupun ekonomi.

Visi Pembangunan Nasional adalah “Terwujudnya Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan”. Kesejahteraan Rakyat artinya terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya bangsa. Tujuan penting ini dikelola melalui kemajuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Demokrasi artinya terwujudnya masyarakat, bangsa dan negara yang demokratis, berbudaya, bermartabat dan menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab serta hak asasi manusia. Keadilan berarti terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh seluruh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia. Sejalan dengan visi nasional, pada periode 2019-2023 Kabupaten Lahat juga mempunyai visi ***“Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Lahat yang Berakhlak, Mandiri, Berkeadilan, Makmur dan Sejahtera serta Terselenggaranya Pembangunan yang Berbasis Pemerataan Berkelanjutan”***

Kunci dalam keberhasilan pencapaian visi tersebut sangatlah dipengaruhi oleh perencanaan yang baik terhadap program-program pembangunan yang akan dilaksanakan. Dalam penyusunan program pembangunan tersebut tentunya tidak dapat serta merta mengadopsi dari kebijaksanaan nasional, maupun daerah lainnya

yang dianggap berhasil, karena setiap daerah memiliki potensi yang berbeda-beda, baik dari potensi kandungan sumber daya alam, kondisi geografis maupun potensi-potensi lainnya. Untuk itu diperlukan serangkaian indikator sosial maupun ekonomi yang sesuai dengan kebutuhan, potensi wilayah dan keadaan struktur fundamental perekonomian wilayah setempat sebagai dasar bagi para perencana dalam penentuan strategi dan kebijakan pembangunan agar visi yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan tepat.

1.2. Tujuan dan Manfaat

Tujuan penulisan Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Lahat Tahun 20120 secara umum adalah untuk menggambarkan perkembangan kondisi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lahat, sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan.

Sedangkan beberapa manfaat penting yang diperoleh dari penyusunan Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Lahat Tahun 2020 ini adalah sebagai berikut :

1. sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan yang telah dilaksanakan selama ini.
2. sebagai bahan perencanaan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan pembangunan ke depan.
3. sebagai bahan akuntabilitas publik terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Lahat.

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup bahasan dalam penulisan Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Lahat Tahun 2020 ini meliputi seluruh wilayah administrasi dalam Kabupaten Lahat dengan referensi waktu atau periode data (indikator) tahun 2015 - 2019.

Sementara aspek spesifik yang diamati dalam indikator kesejahteraan rakyat ini meliputi masalah kependudukan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan,

perumahan, dan kemiskinan. Publikasi ini hanya menyajikan permasalahan kesejahteraan yang dapat diamati dan dapat diukur (measurable welfare) dengan menggunakan berbagai indikator sosial dan juga dilakukan beberapa perbandingan dengan target SDGs Kabupaten Lahat.

1.4. Sumber Data

Data-data makro kesejahteraan rakyat yang digunakan dalam analisis ini bersumber dari data hasil sensus dan survei-survei yang dilakukan oleh BPS. Beberapa survei yang datanya digunakan dalam penyusunan laporan ini antara lain: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), dan lain-lain. Selain itu, untuk memperkaya analisis digunakan pula sumber data lain baik yang berupa hasil sensus atau survei lain yang dilakukan BPS maupun data dari instansi lain sepanjang data tersebut relevan dengan aspek yang dianalisa.

Berbeda dengan terbitan sebelumnya beberapa data/indikator yang disajikan masih mencakup data. Untuk publikasi tahun ini, hasil survei Susenas dan Sakernas sudah dipisahkan antara Kabupaten Lahat dan Provinsi Sumatera Selatan.

1.5. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian dalam penyusunan Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Lahat Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian pertama ini akan dijelaskan tentang latar belakang, tujuan dan manfaat, ruang lingkup, sumber data dan sistematika penyajian.

BAB II. GAMBARAN UMUM

Bagian yang kedua ini menjelaskan gambaran umum kewilayahan dan pemerintahan. Secara rinci subbab yang akan ditampilkan pada bagian ini adalah: Geografis dan Pemerintahan, Visi dan Misi serta Sarana dan Prasarana.

BAB III. KEPENDUDUKAN

Bagian yang ketiga ini menjelaskan tentang kondisi dan dinamika kependudukan di Kabupaten Lahat, meliputi: Jumlah dan pertumbuhan penduduk, Persebaran dan kepadatan Penduduk, Struktur Umur, Rasio Ketergantungan, dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk.

BAB IV. KESEHATAN, FERTILITAS DAN KELUARGA BERENCANA

Bagian yang keempat ini akan melihat dimensi kesehatan masyarakat, tingkat fertilitas dan keluarga berencana.

BAB V. PENDIDIKAN

Bagian yang kelima ini menjelaskan tentang perkembangan kondisi pendidikan penduduk. Secara rinci indikator yang ditampilkan pada bagian kelima antara lain : Fasilitas Pendidikan, Partisipasi Sekolah, Angka Melek Huruf, Pendidikan yang Ditamatkan, serta Rata-rata Lama Sekolah.

BAB VI. KETENAGAKERJAAN

Bagian yang keenam ini menjelaskan tentang perkembangan kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Lahat, antara lain dilihat dari aspek: Tingkat Partisipasi angkatan Kerja, Pengangguran, Tingkat Kesempatan Kerja, serta Distribusi Sektoral Tenaga Kerja.

BAB VII. PERUMAHAN

Bagian yang ketujuh ini akan melihat kondisi perumahan penduduk yang meliputi: Kondisi Fisik Bangunan dan Fasilitas Tempat Tinggal.

BAB VIII. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Pada bagian ini menjelaskan tentang perkembangan capaian pembangunan manusia dilihat dari tolok ukur Indeks Pembangunan Manusia.

BAB II GAMBARAN UMUM

2.1. Geografis dan Pemerintahan

2.1.1. Geografis

Secara Astronomis Kabupaten Lahat terbentang antara $3,25^{\circ}$ sampai dengan $4,15^{\circ}$ Lintang Selatan dan antara $102,37^{\circ}$ sampai dengan $103,45^{\circ}$ Bujur Timur. Daerah agraris dengan luas wilayah keseluruhan mencapai $4.361,84 \text{ km}^2$ merupakan potensi dari Kabupaten Lahat. Dan secara geografis, wilayah Kabupaten Lahat berbatasan dengan 5 (lima) Kabupaten/Kota, sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Muara Enim, sebelah Selatan dengan Kota Pagar Alam dan Kabupaten Bengkulu Selatan, sebelah Timur dengan Kabupaten Muara Enim, dan sebelah Barat dengan Kabupaten Empat Lawang.

Sekitar tahun 1830 pada masa kesultanan Palembang di Kabupaten Lahat telah ada marga, marga-marga ini terbentuk dari sumbai-sumbai dan suku-suku seperti Lematang, Pasemahan, Lintang, Gumai, Tebing Tinggi dan Kikim. Marga merupakan pemerintahan bagi sumbai-sumbai dan suku-suku. Marga inilah merupakan cikal bakal adanya Pemerintahan di Kabupaten Lahat. Tanggal 20 Mei akhirnya ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Lahat sesuai dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan No. 008/SK/1998 tanggal 6 Januari 1998.

Secara umum derajat kemiringan tanah di Kabupaten Lahat bervariasi mulai dari 25 meter sampai dengan 1.000 meter diatas permukaan laut. Kecamatan yang paling rendah dari permukaan laut adalah Kecamatan Merapi Barat, Kecamatan Merapi Timur, dan Kecamatan Kikim Tengah dengan ketinggian 25 – 100 meter diatas permukaan laut, sedangkan kecamatan yang memiliki wilayah tinggi yaitu Kecamatan Tanjung Sakti Pumi, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu, Kecamatan Kota Agung, Kecamatan Jarai, Kecamatan Pajar Bulan dan Kecamatan Muara Payang dengan ketinggian 500 – 1.000 meter diatas permukaan laut.

Jumlah curah hujan tertinggi pada tahun 2019 di kabupaten Lahat terjadi pada bulan desember dengan banyak 333 mm dengan banyaknya jumlah hari hujan 13 hari,

sedangkan untuk jumlah hari hujan yang paling sedikit terjadi pada bulan September dengan jumlah curah hujan 8 mm dengan jumlah hari hujan 2 hari.

Tabel 2.1
Tinggi Rata-rata dan Luas Daerah di Kabupaten Lahat
Tahun 2019

No.	Kecamatan	Tinggi Rata ² dpl ^{*)} (m)	Luas Daerah ^{**)} (Km ²)	% Terhadap Luas Kabupaten ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kabupaten Lahat			4.361,83	100,00
01	Tanjung Sakti Pumi	500-1 000	271,00	6,21
02	Tanjung Sakti Pumu	500-1 000	229,59	5,26
03	Kota Agung	500-1 000	165,59	3,80
04	Mulak Ulu	100-1 000	108,43	2,49
05	Tanjung Tebat	100-1 000	82,72	1,90
06	Mulak Sebingkai	-	63,41	1,45
07	Pulau Pinang	100-500	111,67	2,56
08	Pagar Gunung	100-500	105,51	2,42
09	Gumay Ulu	100-500	87,01	1,99
10	Jarai	500-1 000	167,52	3,84
11	Pajar Bulan	500-1 000	146,11	3,35
12	Muara Payang	500-1 000	37,50	0,86
13	Sukamerindu	-	55,23	1,27
14	Kikim Barat	100-500	272,00	6,24
15	Kikim Timur	100-500	564,45	12,94
16	Kikim Selatan	100-500	124,80	2,86
17	Kikim Tengah	25-100	265,60	6,09
18	Lahat	100-500	107,60	2,47
19	Gumay Talang	100-500	249,61	5,72
20	Lahat Selatan	-	183,87	4,22
21	Pseksu	100-500	269,29	6,17
22	Merapi Barat	25-100	232,64	5,33
23	Merapi Timur	25-100	260,55	5,97
24	Merapi Selatan	100-500	200,14	0,05

Sumber : *) Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lahat

**) Badan Pusat Statistik Kabupaten Lahat

Tabel 2.2
Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan di Kabupaten Lahat
Tahun 2019

Bulan <i>Month</i>	Jumlah Curah Hujan <i>Number of Precipitation (mm)</i>	Jumlah Hari Hujan (hari) <i>Number of Rainy Days (day)</i>	Penyinaran Matahari <i>Duration of Sunshine (%)</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
Januari/ <i>January</i>	199	12	***
Februari/ <i>February</i>	294	15	***
Maret/ <i>March</i>	188	11	***
April/ <i>April</i>	201	12	***
Mei/ <i>May</i>	43	5	***
Juni/ <i>June</i>	89	8	***
Juli/ <i>July</i>	51	5	***
Agustus/ <i>August</i>	35	2	***
September/ <i>September</i>	8	2	***
Oktober/ <i>October</i>	39	4	***
November/ <i>November</i>	94	7	***
Desember/ <i>December</i>	333	13	***

Catatan/Note: ***Data Tidak Tersedia

Sumber/Source: Dinas Pertanian Kabupaten Lahat (DDA Kab. Lahat 2020)

2.1.2. Pemerintahan

Tabel 2.3
Banyaknya Desa dan Kelurahan Dirinci Menurut Kecamatan di Kabupaten Lahat Tahun 2019

No.	Kecamatan	Desa	Kelurahan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kabupaten Lahat		360	17	377
01	Tanjung Sakti Pumi	18		18
02	Tanjung Sakti Pumu	14		14
03	Kota Agung	22		22
04	Mulak Ulu	16		16
05	Tanjung Tebat	14		14
06	Mulak Sebingkai	10		10
07	Pulau Pinang	10		10
08	Pagar Gunung	20		20
09	Gumay Ulu	10		10
10	Jarai	21		21
11	Pajar Bulan	20		20
12	Muara Payang	7		7
13	Sukamerindu	10		10
14	Kikim Barat	19		19
15	Kikim Timur	32		32
16	Kikim Selatan	18		18
17	Kikim Tengah	9		9
18	Lahat	13	16	29
19	Gumay Talang	15		15
20	Lahat Selatan	10		10
21	Pseksu	11		11
22	Merapi Barat	19		19
23	Merapi Timur	13	1	14
24	Merapi Selatan	9		9

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Lahat

Kabupaten Lahat merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan UU No. 22 Tahun 1948, Kepres No. 141 Tahun 1950, PP Pengganti UU No. 3 Tahun 1950 tanggal 14 Agustus 1950. Tanggal 20 Mei akhirnya ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Lahat sesuai dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan No. 008/SK/1998 tanggal 6 Januari 1988. Kabupaten Lahat dahulu hanya terdiri 7 kecamatan induk yaitu Lahat, Kikim, Kota Agung, Jarai, Tanjung Sakti, Pulau Pinang, dan Merapi. Namun pasca pemekaran,

jumlah Kecamatan di Kabupaten Lahat sampai dengan tahun 2019 bertambah menjadi 24 kecamatan. Saat ini Kabupaten Lahat terdiri atas 360 desa dan 17 kelurahan.

Jumlah anggota DPRD Kabupaten Lahat periode 2019-2023 sebanyak 40 orang yang berasal dari 12 partai politik. Komposisi anggota DPRD berdasarkan partai dapat kita cermati pada Tabel 2.3. berikut ini.

Tabel 2.4.
Komposisi Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Lahat Tahun 2019-2023

No.	Nama Fraksi	Jumlah
(1)	(2)	(3)
	Jumlah	40
1.	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	4
2.	Fraksi Golongan karya	5
3.	Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	6
4.	Fraksi Demokrat	6
5.	Fraksi Nasional Demokrat (Nasdem)	2
6.	Fraksi Partai Persatuan Pembangunan	4
7.	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	4
8.	Fraksi Partai Amanat Nasional	3
9.	Fraksi Partai Hanura	2
10.	Fraksi Partai Perindo	2
11.	Fraksi PBB	1
12.	Fraksi PKS	1

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Lahat

Fraksi dengan anggota terbanyak adalah Fraksi Partai Gerindra dan Demokrat dengan jumlah anggota 6 orang atau 15 persen dari total anggota DPRD, disusul oleh Fraksi Golongan Karya dengan jumlah anggota sebanyak 5 orang anggota atau 12,5 persen, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai PPP dan Partai PKB berjumlah 4 anggota atau 10 persen dari anggota DPRD, sedangkan untuk jumlah anggota DPRD paling sedikit yaitu Fraksi Partai Bulan Bintang dan Partai Keadilan Sejahtera dengan anggota masing-masing 1 orang anggota atau 2,5 persen dari jumlah anggota DPRD.

Tabel 2.5.
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan di lingkungan
Pemerintahan Kabupaten Lahat
Tahun 2019 (Orang)

Dinas/Badan/Kantor	Jumlah
(1)	(2)
Total	6.418
SD sederajat	22
SLTP sederajat	81
SLTA sederajat	1.652
Diploma I, II	185
Diploma III/ Sarjana Muda	635
S1, S2, S3	3.843

Sumber : Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lahat

Untuk mendukung jalannya pemerintahan di Kabupaten Lahat, pemerintah daerah Kabupaten Lahat dilengkapi Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang meliputi 2 sekretariat, 23 dinas, 8 badan, dan 24 kecamatan. Adapun jumlah PNS yang bekerja di seluruh OPD tersebut pada tahun 2019 berjumlah 6.418 orang, yang dapat dilihat pada Tabel 2.4 (di atas).

2.2. Visi dan Misi

Dalam rangka untuk mewujudkan kesinambungan pembangunan di Kabupaten Lahat, maka ditetapkan Visi dan Misi Kabupaten Lahat Tahun 2019-2023 sebagai berikut:

Visi:

“Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Lahat yang Berakhlak, Mandiri, Berkeadilan, Makmur dan Sejahtera serta Terselenggaranya Pembangunan yang Berbasis Pemerataan Berkelanjutan”.

Misi:

- a. Menciptakan pemerintahan yang bersih dan inovatif.
- b. Meningkatkan pembangunan infrastruktur publik berbasis pada pemerataan wilayah yang memadai dan efektif.
- c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berahlaq, sehat, cerdas, terampil dan berkepribadian luhur.
- d. Menumbuhkembangkan perekonomian rakyat menuju kedaulatan sumber daya alam yang tersedia.
- e. Memperkokoh kerukunan kehidupan beragama dan budaya yang lestari.

2.3. Sarana dan Prasarana

2.3.1. Sarana Transportasi

Untuk memperlancar kegiatan perekonomian diperlukan prasarana jalan yang merupakan sarana utama dalam mendukung aktivitas perekonomian masyarakat. Dengan prasarana jalan yang memadai, maka mobilitas penduduk dan arus lalu lintas barang akan lebih lancar sehingga secara langsung dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di wilayah tersebut. Kondisi tersebut sejalan dengan misi ketiga yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah Kabupaten Lahat, yaitu tercapainya tatanan ekonomi yang tangguh.

Tabel 2.6
Panjang Jalan Kabupaten Menurut Keadaan Jalan
Tahun 2016–2019

Jalan	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
Panjang Jalan (km)	1 339,15	1 339,15	1 339,15	1 339,15
Keadaan Jalan				
Diaspal (km)	685,92	696.92	698.92	729.8
Kerikil (km)	387,33	384.33	382.33	351.54
Tanah (km)	262,90	257.9	257.9	237.15
Lainnya (km)	3,00	0	0	20.66

Sumber : Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Lahat (DDA Kab. Lahat 2020)

Panjang jalan di seluruh wilayah kabupaten Lahat tahun 2019, mencapai 1.339,15 Km. Dari seluruh panjang jalan yang ada, sepanjang 729.8 km berupa Jalan

aspal, sepanjang 351.54 km jalan kerikil, sisanya 237.15 km berupa jalan masih tanah dan 20.66 lainnya. Dilihat dari jenis permukaan jalan, tampak bahwa kondisi jalan pada tahun 2019 sebagian besar atau sebanyak 54 persen sudah diaspal dan dalam kondisi yang cukup baik. Memang masih terdapat beberapa jalan yang masih kerikil, jalan tanah dan dalam keadaan rusak, keadaan ini perlu segera diperbaiki karena dapat menghambat mobilitas manusia dan barang antar wilayah, yang juga bisa berdampak memperlambat gerak roda perekonomian pada wilayah-wilayah tersebut.

2.3.2. Sarana Perekonomian

Untuk mendukung gerak pertumbuhan ekonomi masyarakat suatu wilayah, fasilitas ekonomi yang paling diperlukan adalah pasar, sehingga suatu wilayah mutlak memerlukan pasar sebagai tempat bertransaksi antar penjual dan pembeli untuk menghasilkan nilai tambah guna meningkatkan pendapatan masyarakat. Dari tahun ke tahun jumlah sarana perdagangan di Kabupaten Lahat terus mengalami perubahan, dimana pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 4,6 persen jika dibandingkan pada tahun 2018. Saat ini di Kabupaten Lahat terdapat 4 (empat) pasar umum, 5.313 toko, 555 kios, dan 652 warung.

Tabel 2.7.
Jumlah Pasar, Toko, Kios dan Warung
di Kabupaten Lahat Tahun 2016-2019 (Unit)

Jenis Sarana Perdagangan	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kabupaten Lahat	559	559	6.842	6.524
Pasar	4	4	4	4
Toko	***	***	5.633	5.313
Kios	555	555	555	555
Warung	***	***	650	652

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lahat

2.3.3. Sarana Pendidikan

Untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Lahat, khususnya dalam rangka mewujudkan masyarakat madani, maka pembangunan bidang pendidikan merupakan salah satu prioritas pembangunan daerah. Dalam rangka pembangunan pendidikan berbagai upaya dilakukan pemerintah, diantaranya dengan meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, baik kuantitas maupun kualitasnya.

Tabel 2.8. menunjukkan bahwa tahun 2019, jumlah fasilitas pendidikan di Kabupaten Lahat terdiri dari SD sebanyak 319, SMP/MTS sebanyak 89, SMU/SMK/MA sebanyak 53, dan 5 (lima) Perguruan Tinggi. Jumlah fasilitas pendidikan di Kabupaten Lahat terus meningkat dari tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 2.8.
Jumlah Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Lahat
Tahun 2016-2019 (Unit)

Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SD/MI	316	317	309	319
SMP/MTS	86	87	88	89
SMU/SMK/MA	55	60	52	53
Perguruan Tinggi	3	3	3	5

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat dan Kementerian Agama Kabupaten Lahat (DDA Kab. Lahat 2020)

2.3.4. Sarana Kesehatan

Pembangunan bidang kesehatan juga merupakan aspek penting dalam rangka mewujudkan masyarakat Lahat yang berkualitas. Untuk mewujudkan peningkatan derajat dan status kesehatan penduduk, ketersediaan dan keterjangkauan fasilitas dan sarana kesehatan merupakan salah satu faktor penentu utama. Puskesmas dan puskesmas pembantu merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan karena dapat menjangkau penduduk sampai di pelosok.

Jumlah sarana kesehatan di Kabupaten Lahat seperti pada Tabel 2.9. tampak bahwa pada tahun 2019 terdapat 2 (dua) rumah sakit, yang terbesar adalah RSUD Lahat. Selain itu terdapat 33 Puskesmas, 59 Puskesmas Pembantu, 8 Poliklinik/ balai pengobatan dan 8 apotek.

Tabel 2.8.
Jumlah Sarana Kesehatan di Kabupaten Lahat
Tahun 2016-2019 (Unit)

Sarana Kesehatan	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Rumah Sakit	***	***	2	2
Puskesmas	***	***	33	33
Puskesmas Pembantu	***	***	55	59
Poliklinik/ Balai Pengobatan	***	***	8	8
Rumah Bersalin	***	***	0	0
Apotek	***	***	8	8

Sumber: BPS, Pendataan Potensi Desa (Podes) 2019

***) Data tidak tersedia

BAB III KEPENDUDUKAN

Kajian mengenai kependudukan yang menjadi fokus bahasan antara lain meliputi, jumlah penduduk, komposisi, dan distribusi penduduk. Jumlah penduduk yang besar merupakan modal dasar pembangunan, walau seringkali dapat menjadi beban dalam proses pembangunan. Untuk itu, pemerintah sebaiknya tidak hanya menitikberatkan pada program pengendalian jumlah penduduk namun juga dapat mempercepat pembangunan kualitas penduduk yakni pembangunan kualitas sumber daya manusia. Disamping itu program perencanaan pembangunan sosial di segala bidang juga harus diutamakan apalagi yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan penduduk.

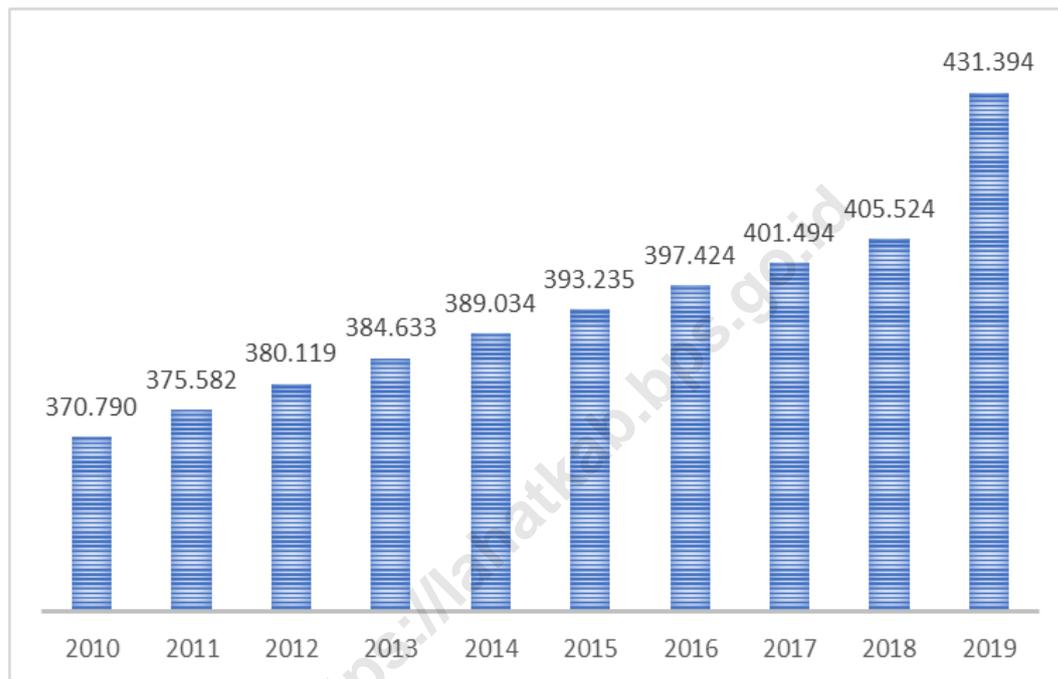
Hal ini disebabkan karena kondisi Kependudukan atau demografi merupakan komponen indikator yang sangat penting karena menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia seperti sandang, pangan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, perumahan maupun lingkungan. Oleh karena itu, kajian kependudukan menjadi fokus utama dalam melihat kesejahteraan masyarakat.

3.1. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk suatu wilayah dapat ditentukan dengan cara sensus atau proyeksi, namun kegiatan sensus penduduk hanya dilaksanakan setiap 10 tahun sekali maka data proyeksi sangat diandalkan menjadi data penunjang pembangunan. Berdasarkan hasil proyeksi penduduk pertengahan tahun, jumlah penduduk Kabupaten Lahat tahun 2019 adalah sebanyak 431.394 jiwa. Bila dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2010, dimana jumlah penduduk sebanyak 370.790 jiwa, maka dapat dikatakan bahwa selama kurun waktu 9 (sembilan) tahun jumlah penduduk bertambah sebanyak 60.604 jiwa. Pertambahan jumlah penduduk dipengaruhi oleh beberapa faktor selain sebagai konsekuensi logis dari kejadian kelahiran dan kematian, juga sangat dipengaruhi oleh faktor perpindahan penduduk baik penduduk

yang datang (migrasi masuk) maupun penduduk yang pindah (migrasi keluar). Berikut merupakan data kependudukan Kabupaten Lahat selama 10 tahun terakhir.

Grafik 3.1.
Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Lahat
Tahun 2010- 2019 (jiwa)



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lahat

3.2. Persebaran dan Kepadatan Penduduk

Data persebaran penduduk antara lain berguna untuk melihat tingkat pemerataan/ketimpangan distribusi penduduk antar wilayah, untuk melihat potensi jumlah sumber daya manusia di suatu wilayah, dan untuk melihat potensi daya dukung sumber daya alam terhadap jumlah penduduk.

Persebaran penduduk menurut kecamatan di wilayah Kabupaten Lahat tidak merata. Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Kecamatan Lahat (25,14%), Kikim Timur (7,4%), Merapi Barat (6,03%), Merapi Timur (5,73%) dan Jarai (4,88%). Kelima kecamatan tersebut dihuni oleh sekitar 49,18 persen penduduk Kabupaten Lahat. Sementara kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit

adalah Kecamatan Gumay Ulu (1,3%), Kecamatan Mulak Sebingkai (1,36%), Kecamatan Sukamerindu (1,71%) dan Kecamatan Merapi Selatan (1,83%).

Tabel 3.1.
Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun dan Laju pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Lahat Tahun 2019

Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk per-Tahun 2018-2019	Persentase Penduduk (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Kabupaten Lahat	431,394	0.19	100
1. Tanjung Sakti Pumi	16,875	0.54	3.91
2. Tanjung Sakti Pumu	14,464	-1.32	3.35
3. Kota Agung	13,774	0.62	3.19
4. Mulak Ulu	12,719	0.27	2.95
5. Tanjung Tebat	8,884	-1.30	2.06
6. Mulak Sebingkai	5,851	0.93	1.36
7. Pulau Pinang	9,852	-1.27	2.28
8. Pagar Gunung	13,049	-0.21	3.02
9. Gumay Ulu	5,593	0.34	1.30
10. Jarai	21,050	-1.74	4.88
11. Pajar Bulan	12,946	-0.05	3.00
12. Muara Payang	8,942	-0.38	2.07
13. Sukamerindu	7,900	-1.19	1.83
14. Kikim Barat	17,704	1.71	4.10
15. Kikim Timur	31,935	0.39	7.40
16. Kikim Selatan	17,596	1.33	4.08
17. Kikim Tengah	10,012	1.47	2.32
18. Lahat	108,465	-0.81	25.14
19. Gumay Talang	12,823	0.69	2.97
20. Pseksu	9,221	0.68	2.14
21. Lahat Selatan	12,464	5.45	2.89
22. Merapi Barat	26,027	0.89	6.03
23. Merapi Timur	24,705	2.31	5.73
24. Merapi Selatan	8,543	0.35	1.98

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lahat

Tidak meratanya persebaran penduduk juga dapat dilihat dari angka kepadatan penduduk di masing-masing kecamatan. Pada tahun 2019 kepadatan

penduduk di Kabupaten Lahat sekitar 98,9 jiwa per km². Jika ditinjau menurut kecamatan, tingkat kepadatan tertinggi adalah di Kecamatan Lahat dengan 1008,04 jiwa per km², disusul Kecamatan Muara Payang dengan 238,45 jiwa per km² dan Kecamatan Kikim Selatan dengan 140,99 jiwa per km². Sedangkan kepadatan penduduk terendah terdapat di Kecamatan Kecamatan Kikim Tengah dengan 37,30 km² orang per km², Merapi Selatan dengan 42,69 orang per km² orang per km² dan Kecamatan Lahat Selatan yaitu 46,28 jiwa per km².

Tabel 3.2.
Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Lahat Tahun 2019

Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Luas Daerah (km ²)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
(1)	(2)	(3)	(4)
Kabupaten Lahat	431,394	361,84	98.90
1. Tanjung Sakti Pumi	16,875	271,00	62.27
2. Tanjung Sakti Pumu	14,464	229,59	63.00
3. Kota Agung	13,774	165,59	83.18
4. Mulak Ulu	12,719	108,43	117.30
5. Tanjung Tebat	8,884	82,72	107.40
6. Mulak Sebingkai	5,851	63,41	92.27
7. Pulau Pinang	9,852	111,67	88.22
8. Pagar Gunung	13,049	105,51	123.68
9. Gumay Ulu	5,593	87,01	64.28
10. Jarai	21,050	167,52	125.66
11. Pajar Bulan	12,946	146,11	88.60
12. Muara Payang	8,942	37,50	238.45
13. Sukamerindu	7,900	55,23	143.04
14. Kikim Barat	17,704	272,0	65.09
15. Kikim Timur	31,935	564,45	56.58
16. Kikim Selatan	17,596	124,8	140.99
17. Kikim Tengah	10,012	265,6	37.70
18. Lahat	108,465	107,6	1,008.04
19. Gumay Talang	12,823	249,61	51.37
20. Pseksu	9,221	183,87	50.15
21. Lahat Selatan	12,464	269,29	46.28
22. Merapi Barat	26,027	232,64	111.88

23. Merapi Timur	24,705	260,55	94.82
24. Merapi Selatan	8,543	200,14	42.69

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lahat

3.3. Struktur Umur

Dalam analisis kependudukan, perubahan demografis yang penting adalah perubahan struktur umur. Perubahan yang terjadi sebagai akibat dari perubahan tingkat fertilitas, mortalitas dan migrasi. Dengan kemajuan sosial ekonomi suatu daerah akan terjadi kecenderungan persentase penduduk umur muda akan mengalami penurunan, sebaliknya persentase penduduk umur tua akan mengalami peningkatan. Umur merupakan informasi dasar yang sangat penting. Kesalahan pencatatan informasi umur akan berdampak sangat fatal, karena struktur umur menjadi dasar dalam penghitungan berbagai indikator kependudukan dan indikator lainnya.

Analisis mengenai struktur umur penduduk sangat penting bagi pemerintah dan swasta. Bagi pemerintah, komposisi penduduk menurut umur penting untuk bahan pertimbangan perumusan kebijakan publik karena pelayanan kebutuhan penduduk sangat bervariasi menurut umur. Misalnya, fasilitas pelayanan kesehatan bagi balita dan lansia sangat berbeda. Fasilitas kesehatan balita cenderung kearah peningkatan gizi dan imunisasi, sedangkan pelayanan kesehatan lansia seharusnya lebih cenderung kearah perawatan penyakit kronis. Bagi swasta, struktur umur penduduk akan mempengaruhi segmentasi pasar. Segmen pasar bagi produk tertentu juga berbeda menurut umur. Struktur umur penduduk Kabupaten Lahat dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Dilihat dari struktur umur dapat dikatakan bahwa struktur umur penduduk Kabupaten Lahat masih tergolong muda, dimana persentase penduduk muda (kelompok umur 0-14 tahun) masih cukup tinggi sekitar 27 persen. Tabel 3.3 juga memperlihatkan bahwa di Kabupaten Lahat telah terjadi pergeseran struktur umur, meskipun belum signifikan. Hal ini terlihat dari semakin meningkatnya proporsi

penduduk usia tua dan semakin menurunnya proporsi penduduk kelompok umur muda.

Tabel 3.3.
Jumlah Penduduk Kabupaten Lahat Menurut Kelompok Umur
Tahun 2015-2018

Kelompok Umur	2016		2017		2018		2019	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0 – 14	112 959	28,42	113 022	28,15	113 076	27,88	113.019	27
15 – 64	263 571	66,32	266 816	66,46	269 925	66,56	272.854	67
65 +	20 894	5,26	21 656	5,39	22 523	5,55	23.509	6
Jumlah	397 424	100,00	401 494	100,00	401 494	100,00	409.382	100,00

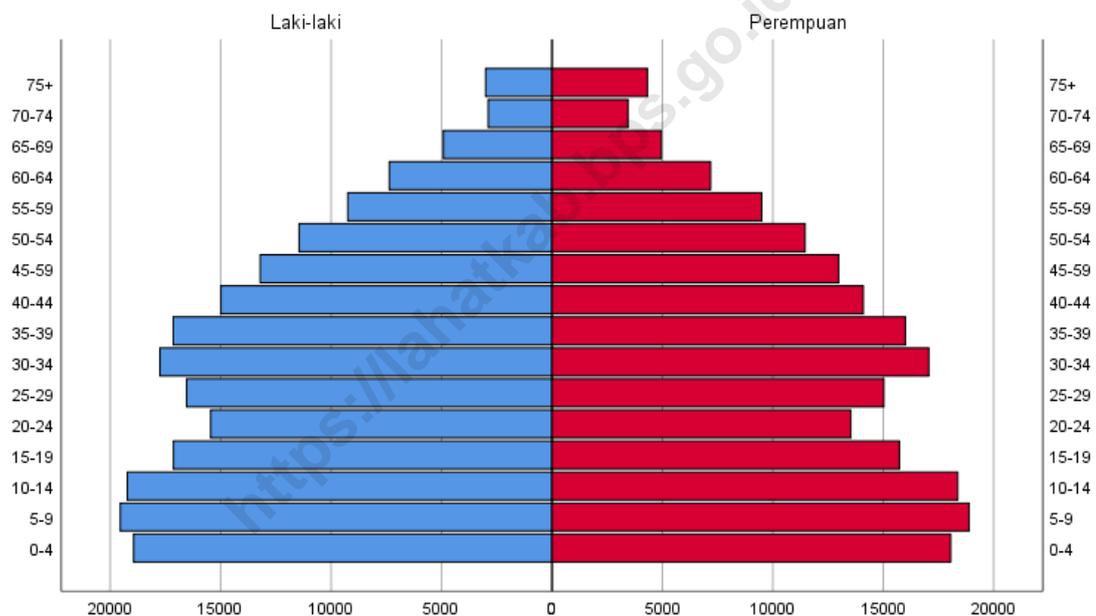
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lahat

Dari tabel 3.3 juga dapat kita lihat bahwa dalam 4 (empat) tahun terakhir Kabupaten Lahat telah menikmati bonus demografi. Bonus demografi adalah keuntungan yang dinikmati oleh suatu wilayah sebagai akibat dari besarnya proporsi penduduk produktif (rentang usia 15-64 tahun) dalam evolusi kependudukan yang dialami oleh wilayah tersebut. Bonus demografi adalah suatu fenomena dimana struktur penduduk sangat menguntungkan dari sisi pembangunan karena jumlah penduduk usia produktif sangat besar, sedang proporsi usia muda sudah semakin kecil dan proporsi usia lanjut belum banyak. Oleh karena itu, bonus demografi dapat menjadi anugerah bagi Kabupaten Lahat, dengan syarat pemerintah harus menyiapkan generasi muda yang berkualitas tinggi SDM-nya melalui pendidikan, pelatihan, kesehatan, penyediaan lapangan kerja dan investasi.

Perubahan pada struktur umur penduduk akan lebih jelas dengan menggunakan piramida penduduk. Piramida penduduk adalah grafik berbentuk piramida yang merupakan gambaran secara visual dari komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Perubahan pada bentuk piramida penduduk akan dipengaruhi oleh tingkat kelahiran, tingkat kelangsungan hidup setiap kelompok umur, serta oleh proses perpindahan penduduk. Penduduk dengan tingkat kelahiran

tinggi biasanya ditandai dengan bentuk piramida yang alasnya lebar kemudian berangsur mengecil hingga ke puncak piramida. Tingkat kelahiran yang rendah ditandai oleh bentuk piramida dengan alas yang tidak begitu lebar dan tidak langsung mengecil hingga puncaknya. Sedangkan tingkat kelangsungan hidup dan tingkat perpindahan penduduk pada setiap kelompok umur akan mempengaruhi fluktuasi dalam piramida.

Gambar 3.2
Piramida Penduduk Kabupaten Lahat Tahun 2019 (jiwa)



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lahat

3.4. Rasio Jenis Kelamin

Evaluasi komposisi penduduk menurut jenis kelamin dapat memberikan gambaran struktur penduduk suatu wilayah menurut jenis kelamin. Menurut teori demografi, pada awal-awal tahun kelahiran, secara umum jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari penduduk perempuan. Melalui proses demografi, penduduk laki-laki biasanya cenderung lebih rentan dalam hal tingkat kesehatan dan memiliki angka

harapan hidup yang lebih rendah dari penduduk perempuan. Di sisi lain penduduk laki-laki memiliki tingkat mobilitas yang lebih tinggi dari perempuan terkait aktivitasnya untuk bersekolah atau mencari pekerjaan di tempat lain. Proses demografi tersebut berfluktuasi menurut kelompok umur.

Tabel 3.4.
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Lahat Tahun 2019

Kelompok Umur	Laki-laki		Perempuan		Rasio Jenis Kelamin
	Jumlah (jiwa)	%	Jumlah (jiwa)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0 – 14	57.712	28	55.307	28	104,35
15 – 64	140.293	67	132.561	66	105,83
65 +	10.805	5	12.704	6	85,05
Jumlah	208.810	100	200.572	100	104,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lahat

Data pada Tabel 3.4. memperlihatkan bahwa rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Lahat tahun 2019 adalah 104 artinya dari setiap 100 orang penduduk perempuan terdapat sekitar 104 orang penduduk laki-laki. Pada kelompok umur muda (0-14 tahun) rasio jenis kelamin sebesar 104,35, dimana dalam 100 perempuan terdapat penduduk berjenis kelamin laki-laki 104 jiwa, untuk penduduk rentang umur produktif (15-64 tahun) memiliki rasio 105,83 dan umur tua (65 tahun keatas) rasio jenis kelamin sebesar 84,21 artinya pada kelompok umur tua jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibanding penduduk laki-laki. Data ini sesuai dengan realita bahwa pada usia tua kemampuan bertahan hidup (*survival rate*) kaum perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan kaum laki-laki.

3.5. Rasio Ketergantungan

Ada tiga pengelompokan penduduk berkenaan dengan kaitan antara struktur umur dan kemampuan memproduksi secara ekonomi, yaitu:

- Kelompok penduduk usia muda (P_{0-14}), yaitu penduduk yang berumur dibawah 15 tahun (0-14 tahun).
- Kelompok penduduk usia produktif (P_{15-64}), yaitu penduduk yang berumur 15-64 tahun.
- Kelompok penduduk usia tua (P_{65+}), yaitu penduduk yang berumur 65 tahun ke atas.

Rasio ketergantungan (*Dependency Ratio*) adalah angka yang menyatakan perbandingan antara penduduk yang tidak produktif (usia muda dan usia tua) terhadap penduduk usia produktif. Angka ini menyatakan jumlah orang yang secara ekonomi tidak aktif per seratus penduduk yang aktif secara ekonomi. Secara matematis, hubungan tersebut dapat dituliskan sebagai berikut:

Total dependency ratio = Youth dependency ratio + Aged dependency ratio

$$\text{Total Dependency Ratio (DR)} = \frac{P_{0-14} + P_{65+}}{P_{15-64}} \times 100$$

$$\text{Youth Dependency Ratio (YDR)} = \frac{P_{0-14}}{P_{15-64}} \times 100$$

$$\text{Aged Dependency Ratio (ADR)} = \frac{P_{65+}}{P_{15-64}} \times 100$$

Rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Lahat tahun 2019 sebesar 50,04. Artinya setiap 100 orang usia produktif akan menanggung sebanyak 50 orang penduduk yang tidak produktif. Jika dilihat rasio ketergantungan antara penduduk muda (YDR) dan rasio ketergantungan penduduk tua (ODR) secara umum dapat dikatakan bahwa yang menjadi beban tanggungan penduduk usia produktif sebagian besar adalah penduduk usia muda (0-14 tahun). Hal ini terlihat dari angka YDR yang mencapai 41,42 sedangkan ODR hanya sebesar 8,62.

Tabel 3.5.
Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*) Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2016-2019

Rasio Ketergantungan	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
DR	46,63	46,54	50,24	50,04
YDR	38,95	38,56	41,89	41,42
ODR	7,68	7,98	8,34	8,62

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lahat

Dalam 4 (empat) tahun terakhir tampak bahwa rasio ketergantungan penduduk muda cenderung menurun sementara rasio ketergantungan penduduk tua menunjukkan kecenderungan meningkat. Lama kelamaan jumlah penduduk tua akan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya kesehatan dan kesejahteraan lansia. Hal ini sesuai dengan angka harapan hidup yang semakin tinggi setiap tahunnya.

BAB IV

KESEHATAN, FERTILITAS DAN KELUARGA BERENCANA

Aspek kesehatan sangat berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia sebagai pelaku pembangunan. Manusia yang sehat baik mental maupun fisik akan mampu berperan lebih baik dalam pembangunan dan dapat menghasilkan produktivitas kerja yang tinggi dan pada akhirnya akan berpengaruh terhadap taraf kesejahteraannya.

Sasaran pembangunan kesehatan adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan kualitas dan pelayanan kesehatan yang makin menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Beberapa indikator untuk melihat derajat kesehatan masyarakat serta bagaimana kecenderungan penurunan fertilitas di Kabupaten Lahat akan dibahas dalam bab ini.

4.1. Ketersediaan Fasilitas Kesehatan

Dalam rangka meningkatkan derajat dan status kesehatan penduduk telah dilakukan berbagai upaya antara lain melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan seperti pembangunan rumah sakit, puskesmas/pustu, poskesdes; penyediaan obat yang terjangkau oleh masyarakat; dan penambahan serta pendistribusian tenaga kesehatan hingga ke pelosok daerah.

Dari tahun 2016-2019 fasilitas kesehatan yang aktif di Kabupaten Lahat mengalami perubahan dimana, dimana pada tahun 2019 terdapat penambahan Puskesmas Pembantu sebesar 4 (empat) unit fasilitas kesehatan jika dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 55 unit, kemudian pada tahun 2019 terdapat juga penambahan di fasilitas kesehatan Puskesmas sebanyak 5 (lima) unit kesehatan sedangkan untuk Rumah Sakit, Apoik dan Poliklinik pada tahun 2019 tidak mengalami penambahan fasilitas kesehatan, untuk lebih jelas dapat dilihat pada table 4.1

Tabel 4.1.
Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Lahat Tahun 2016-2019 (unit)

Fasilitas Kesehatan	Rasio per 10.000 Penduduk			
	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Rumah Sakit	2	2	2	2
Rumah Sakit Bersalin	0	0	0	0
Poliklinik	13	13	8	8
Puskesmas	33	33	28	33
Puskesmas Pembantu	65	65	55	59
Apotek	19	19	8	8

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat (DDA Kabupaten Lahat 2016-2019)

4.2. Kesehatan Balita

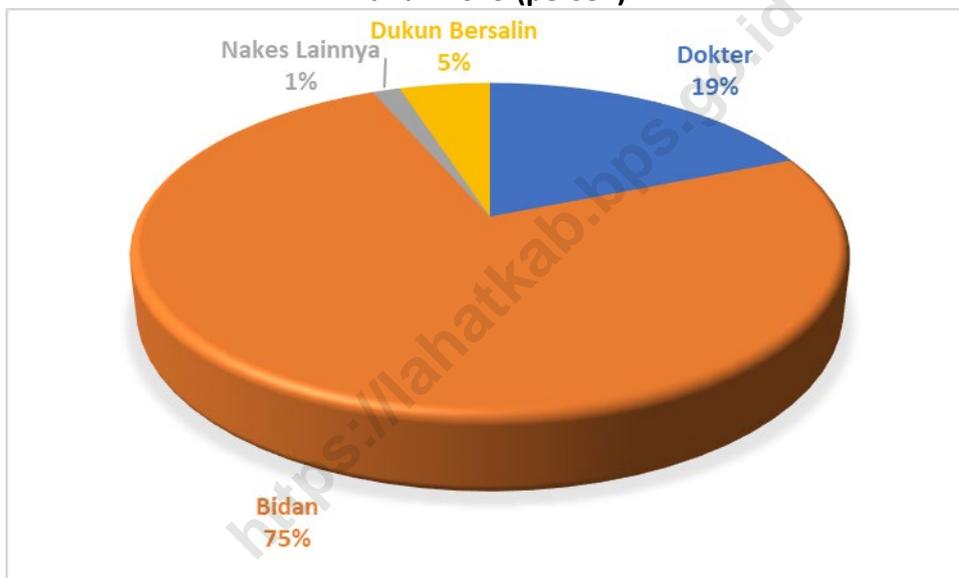
Aspek penting pembangunan kesehatan adalah kaitannya dengan upaya pengembangan sumber daya manusia yaitu kesehatan ibu dan anak. Karena kualitas SDM baik mental maupun fisik akan sangat ditentukan oleh pola perilaku sehat dari seorang ibu terutama pada saat hamil, melahirkan dan perawatan bayi dan balita. Karenanya kualitas kesehatan ibu dan anak akan mencerminkan kualitas kesehatan masyarakat.

Pemanfaatan fasilitas tenaga kesehatan merupakan salah satu faktor penentu untuk mewujudkan derajat kesehatan penduduk. Termasuk yang tidak kalah pentingnya adalah tenaga penolong persalinan bayi. Hal ini berkaitan dengan upaya menurunkan angka kematian bayi dan kematian ibu. Persalinan yang ditolong oleh tenaga medis profesional akan mengurangi resiko terjadinya kematian bayi maupun kematian ibu saat melahirkan. Selain itu, angka persalinan yang ditolong oleh tenaga medis dapat digunakan sebagai salah satu indikator kesejahteraan masyarakat, karena hal tersebut menggambarkan tingkat pengetahuan masyarakat tentang kesehatan persalinan dan sekaligus mencerminkan kemampuan untuk membayar tenaga medis profesional.

Tingkat kesadaran dan kepercayaan masyarakat Kabupaten Lahat terhadap pelayanan kesehatan oleh tenaga medis pada saat ini sudah cukup tinggi. Hal ini

terlihat dari semakin meningkatnya jumlah persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan (dokter dan bidan) dan semakin menurunnya kecenderungan penduduk yang menggunakan non tenaga kesehatan (dukun bersalin) sebagai tenaga penolong persalinan. Menurut data tahun 2019 persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan (dokter, bidan dan perawat) mencapai 95 persen, sedangkan persalinan yang ditolong oleh non tenaga kesehatan (dukun bersalin) sebesar 5 (lima) persen.

Grafik 4.1.
Jumlah Balita Menurut Penolong Kelahiran
Tahun 2019 (persen)



Sumber: BPS, diolah dari data Susenas

Tabel 4.2.
Persentase Anak Usia 1-2 tahun yang Pernah Disusui Menurut Lama Mendapatkan ASI Eksklusif dan Lamanya Disusui di Kabupaten Lahat Tahun 2016-2019

Anak Usia 1-4 Tahun	2016	2017	2018*	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Lama mendapatkan ASI eksklusif (Bulan)	4,64	4,71		5,04
Lama Disusui (Bulan)	10,26	11,81		12,15

Sumber: BPS, diolah dari data Susenas
 Catatan :*) Data 2018 tidak tersedia

Selain aspek penolong kelahiran, pemberian Air Susu Ibu (ASI) juga sangat penting bagi kesehatan bayi dan balita. ASI merupakan makanan yang paling penting bagi pertumbuhan dan kesehatan bayi, karena selain mengandung zat gizi yang lengkap, ASI juga dapat memberikan kekebalan pada bayi terhadap penyakit umum yang sering menyerang anak-anak. Karenanya, diharapkan ibu-ibu untuk dapat memberikan ASI kepada bayinya secara optimal, sesuai dengan batas usia bayi yang dianjurkan.

Pola pemberian ASI pada anak usia 1-2 tahun di Kabupaten Lahat dari tahun 2016-2019 dapat dilihat pada tabel 4.2. Dalam hal ini tampaknya kesadaran ibu-ibu untuk memberikan ASI kepada buah hatinya semakin menurun. Rata-rata pemberian ASI eksklusif selama tahun 2016-2019 hanya sekitar 5 bulan (seharusnya 6 bulan), sedangkan lama pemberian ASI hanya sekitar 12 bulan (seharusnya 24 bulan). Lamanya pemberian ASI yang ideal menurut ahli kesehatan adalah 2 tahun. Pada tahun 2019 lama pemberian ASI Eksklusif pada anak umur 1-2 tahun hanya 5,04 bulan, sedangkan lama pemberian ASI hanya 12,15 bulan.

Kesehatan balita juga dipengaruhi oleh daya tahan tubuhnya. Keadaan kesehatan dan daya tahan tubuh terhadap serangan penyakit merupakan salah satu modal utama untuk mencapai derajat kesehatan yang baik. Pada usia bayi terdapat 7 (tujuh) penyakit infeksi yang dapat menimbulkan kematian atau kecacatan, yaitu poliomyelitis, campak, batuk rejan, tetanus, TBC dan hepatitis B. Penyakit-penyakit tersebut dapat dicegah dengan imunisasi dan mempertahankan status gizi yang baik. Pemberian imunisasi pada bayi akan meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit infeksi tersebut. Imunisasi harus lengkap diberikan kepada bayi sebelum usia satu tahun.

Cakupan imunisasi balita di Kabupaten Lahat pada tahun 2019 relatif menurun dari tahun 2017. Secara umum untuk masing-masing jenis imunisasi sudah cukup baik. Cakupan tertinggi di tahun 2019 adalah pada imunisasi POLIO yaitu mencapai 94,99 persen dan terendah pada imunisasi CAMPAK/ MORBILI yaitu sebesar 68,01 persen. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 4.3 di bawah ini:

Tabel 4.3.
Persentase Balita Mendapat Imunisasi Menurut Jenis Imunisasi
Tahun 2016-2019

IMUNISASI	2016	2017	2018*	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
BCG	97,48	91,91		91,31
DPT	91,74	91,70		87,89
POLIO	95,88	95,89		94,99
CAMPAK/MORBILI	82,49	79,92		68,01
HEPATITIS B	91,94	93,38		89,75

Sumber: BPS, diolah dari data Susenas
Catatan :*) Data 2018 tidak tersedia

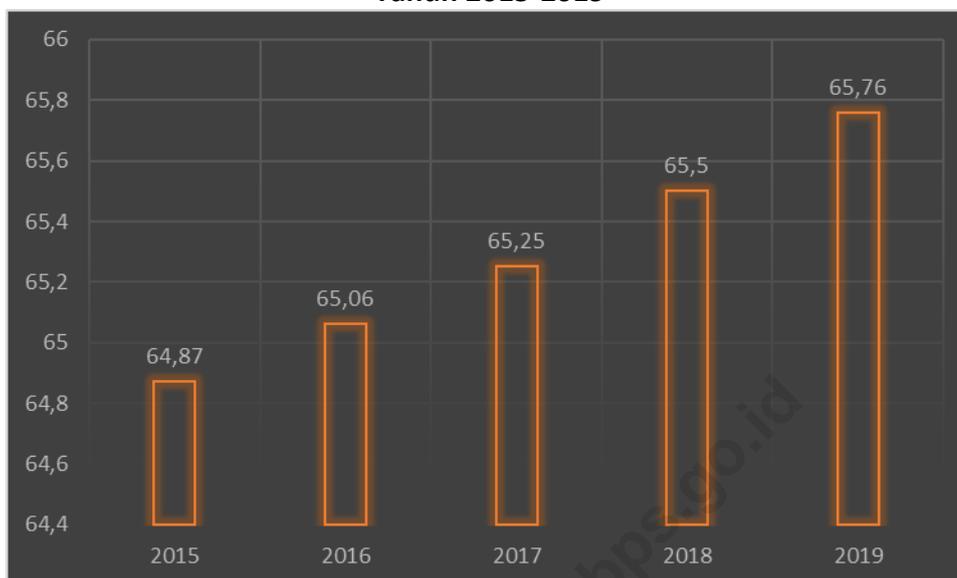
4.3. Mortalitas

Keberhasilan pembangunan kesehatan di suatu daerah atau negara adalah menurunnya tingkat kematian (mortalitas). Penurunan tersebut biasanya disebabkan oleh keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi, penyediaan sarana kesehatan dan peningkatan pendapatan serta peningkatan kualitas sosial ekonomi penduduk secara keseluruhan. Karenanya data kematian penduduk merupakan salah satu indikator penting untuk menggambarkan kemajuan pembangunan bidang kesehatan khususnya dan peningkatan kondisi sosial ekonomi masyarakat pada umumnya.

4.3.1. Angka Harapan Hidup

Sejalan dengan menurunnya angka kematian bayi sebagai akibat membaiknya kondisi kesehatan dan sosial ekonomi masyarakat, maka angka harapan hidup penduduk akan meningkat. Dari tahun ke tahun angka harapan hidup di Kabupaten Lahat semakin meningkat, hal ini dapat dilihat dari gambar 4.2. Pada tahun 2018 angka harapan hidup hanya 65,5 dan di tahun 2019 sudah meningkat menjadi 65,76. Di tahun 2018 Angka Harapan Hidup 65,76 artinya, seorang anak yang lahir pada tahun tersebut secara rata-rata akan hidup sampai 65,76 tahun.

Grafik 4.2.
Angka Harapan Hidup di Kabupaten Lahat
Tahun 2015-2019



Sumber: Badan Pusat Statistik

4.4. Fertilitas dan Keluarga Berencana

Sebagai negara yang sedang membangun, Indonesia cenderung mempunyai masalah kependudukan yang serius, yaitu jumlah penduduk yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang relatif tinggi dan penyebaran secara geografis yang tidak merata. Dengan kondisi tersebut, jumlah penduduk bagi Indonesia bukan hanya merupakan modal, akan tetapi dapat juga menjadi beban dalam pembangunan. Oleh karena itu, untuk menunjang keberhasilan pembangunan, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat, perkembangan penduduk diarahkan pada pengendalian kuantitas demi peningkatan kualitas penduduk. Salah satu upaya untuk mengendalikan kuantitas adalah dengan menekan laju pertumbuhan penduduk yaitu dengan menurunkan tingkat kelahiran.

4.4.1. Penolong Persalinan

Salah satu penekan Angka Kematian Ibu (AKI) saat melahirkan adalah dengan menggunakan tenaga penolong kelahiran, dimana pada tahun 2019 penolong persalinan yang banyak digunakan oleh para Ibu di Kabupaten Lahat Bidan yaitu

sebesar 74,76 persen kemudian di susul oleh tenaga Dokter sebesar 18,79 persen dan yang paling sedikit adalah Nakes lainnya sebesar 1,51 persen, Gambaran mengenai keadaan tenaga kesehatan penolong kelahiran di Kabupaten Lahat seperti yang terlihat pada Tabel 4.4. di bawah ini.

Tabel 4.4.
Penolong Persalinan Menurut Tenaga Kesehatan
di Kabupaten Lahat (Persen) Tahun 2016-2019

Kelompok Umur (Tahun)	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
Dokter	13,68	15,44	24,52	18,79
Bidan	78,65	73,64	65,54	74,76
Nakes Lainnya	0,77	2,46	0,8	1,51
Dukun Bersalin	6,89	8,45	9,14	4,93

Sumber: BPS, diolah dari data Susenas

Pada tahun 2017 rata-rata jumlah anak lahir hidup (ALH) dari wanita pernah kawin di Kabupaten Lahat adalah 1,797 Artinya, rata-rata jumlah anak yang pernah dilahirkan hidup oleh setiap wanita pernah kawin usia 15-49 tahun adalah sebanyak 1-2 orang anak. Dari data di atas, tampak bahwa sepanjang tahun 2015-2017 Angka Anak Lahir Hidup semakin menurun hal ini turut mengindikasikan berhasilnya pelaksanaan program KB di Kabupaten Lahat.

4.4.2. Umur Perkawinan Pertama

Umur perkawinan pertama merupakan salah satu indikator untuk menggambarkan tingkat fertilitas, karena semakin muda seseorang melakukan perkawinan semakin panjang masa reproduksinya, sehingga semakin besar peluang untuk melahirkan anak. Umur perkawinan pertama merupakan salah satu faktor yang cukup berpengaruh terhadap penurunan fertilitas. Hull dan Singarimbun (Budi Suradji, 1981 : 5) mengatakan, dalam proses penurunan TFR, 25 persen dipengaruhi oleh kenaikan umur kawin di kalangan wanita.

Data pada tabel 4.5. menunjukkan bahwa umur perkawinan wanita di Kabupaten Lahat tahun 2019 sudah cukup dewasa. Terdapat perubahan karakteristik, yakni sebagian besar wanita pernah kawin di Kabupaten Lahat memasuki perkawinan pada umur dewasa diatas 19 tahun sekitar 62,67 persen. Sementara 23,88 persen lainnya memasuki perkawinan pada usia 17-18 tahun dan 13,46 persen pada usia muda ≤ 16 tahun. Usia perkawinan yang terlalu muda dapat berpengaruh terhadap kesehatan ibu saat melahirkan. Salah satu faktor tingginya *maternal mortality* atau kematian ibu diduga juga berkaitan dengan usia perkawinan yang terlalu muda.

Tabel 4.5.
Persentase Wanita Pernah Kawin Menurut Umur Perkawinan Pertama di Kabupaten Lahat Tahun 2016-2019

Umur Perkawinan Pertama	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
≤ 16	15,18	15,55	14,64	13,46
17 – 18	22,81	21,40	23,31	23,88
19 - 24	50,52	48,30	48,49	48,04
25 +	11,50	13,75	13,55	14,63
Jumlah (%)	100,00	100,00	100,00	100,00

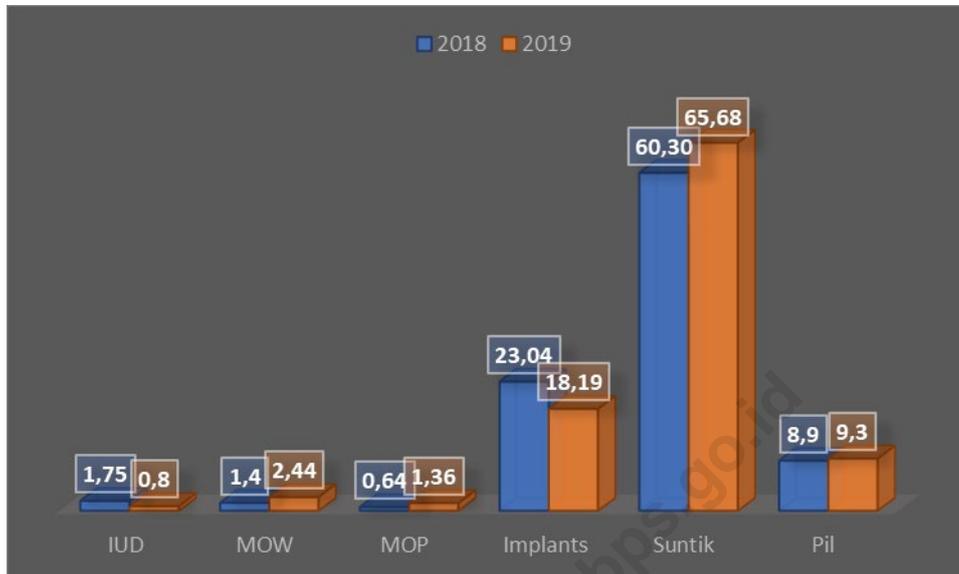
Sumber: BPS, diolah dari data Susenas

4.4.3. Keluarga Berencana

Seperti diuraikan sebelumnya bahwa salah satu upaya untuk menurunkan laju pertumbuhan penduduk adalah menurunkan tingkat fertilitas. Bagi Indonesia, program Keluarga berencana yang telah dilaksanakan mulai tahun 70-an merupakan salah satu program yang efektif dalam menurunkan angka kelahiran/ fertilitas.

Sampai saat ini program KB masih terus dilaksanakan meskipun pelaksanaannya tidak seketat pada masa awal dilaksanakannya program tersebut, karena tingkat kesadaran masyarakat tentang KB sudah relatif tinggi. Dewasa ini pelaksanaan program KB tidak hanya sekedar upaya untuk menekan tingkat kelahiran, tetapi lebih diarahkan kepada pembentukan kualitas keluarga.

Grafik 4.3.
Persentase Wanita kawin Berusia 15-49 Tahun Menurut Alat KB yang Sedang Digunakan Tahun 2018-2019



Sumber: BPS, diolah dari data Susenas

Pada tahun 2019, dari total wanita kawin umur 15-49 tahun sebanyak 65,68 persen lebih menggunakan alat KB berupa Suntikan. Jenis alat KB lainnya yang cukup dipercayai oleh wanita di Kabupaten Lahat adalah Susuk sebanyak 18,19 persen walau pun mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2018 yaitu 23,04 persen atau turun 4,85 persen dibandingkan tahun sebelumnya dan KB Pil mengalami kenaikan menjadi 9,3 persen atau naik 0,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dari data di atas alat KB Suntikan masih lebih dominan dibandingkan alat KB lainnya dikarenakan lebih praktis, aman dan ekonomis. Akan tetapi alat KB Pil meningkat dibandingkan tahun sebelumnya karena dirasakan lebih nyaman penggunaannya dan murah. Sedangkan alat KB seperti MOW/tubektomi, MOP/ Vasektomi, IUD/ Spiral, Kondom, Intravag/ Tissue/ Kondom Wanita dan tradisional kurang diminati oleh pasangan usia subur di Kabupaten Lahat.

<https://lahatkab.bps.go.id>

BAB V PENDIDIKAN

Berbagai upaya dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan taraf pendidikan masyarakat, misalnya dengan mengembangkan pendidikan anak usia dini, meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, meningkatkan anggaran pendidikan, memperbaiki kurikulum, serta meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga pendidikan. Bahkan sejak tahun 1994 pemerintah juga menerapkan program wajib belajar 9 tahun. Dukungan pemerintah daerah juga sangat besar dalam rangka memajukan pendidikan, yaitu melalui program pendidikan gratis mulai dari tingkat SD sampai SLTA. Melalui program ini diharapkan tingkat pendidikan penduduk akan semakin baik. Kesemuanya itu berangkat dari kesadaran akan pentingnya pendidikan baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Bagi pemerintah keuntungan yang akan diperoleh dari investasi di bidang pendidikan antara lain bahwa pendidikan merupakan salah satu cara dalam rangka memerangi kemiskinan, mengurangi ketimpangan pendapatan dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Sedangkan bagi masyarakat, pendidikan yang semakin baik merupakan modal dalam memperebutkan kesempatan kerja, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan mereka.

Hal ini dikarenakan pembangunan bidang pendidikan mempunyai peranan yang sangat besar dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Paling tidak ada dua alasan mengapa pemerintah menempatkan pembangunan SDM sebagai isu pokok dalam pembangunan nasional bersama-sama dengan isu pembangunan ekonomi (Tjitoherijanto, 1977). Pertama, pendekatan pertumbuhan ekonomi nampaknya kurang berhasil dalam mengurangi tingkat kemiskinan absolut maupun relatif. Sebaliknya pembangunan SDM menjanjikan adanya pertumbuhan ekonomi yang dibarengi oleh pemerataan pendapatan. Kedua, pada era globalisasi saat ini keberhasilan suatu bangsa di ajang internasional tidak lagi ditentukan oleh keunggulan komparatif seperti kekayaan sumber daya alam yang dimiliki, akan tetapi akan sangat ditentukan oleh keunggulan kompetitif, yang dalam hal ini akan sangat

ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya. Karenanya pendidikan sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia menjadi instrumen yang sangat penting.

Bab ini akan diuraikan mengenai keadaan pendidikan penduduk Lahat melalui pendekatan indikator-indikator pendidikan seperti angka partisipasi sekolah, angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah.

5.1. Fasilitas Pendidikan

Untuk meningkatkan partisipasi sekolah penduduk, harus didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Selain fasilitas berupa gedung sekolah, ketersediaan tenaga pengajar/guru, merupakan faktor penting dalam kegiatan belajar mengajar. Jumlah sekolah dikatakan memadai apabila dapat menampung seluruh penduduk usia sekolah yang akan melanjutkan pendidikan, demikian juga dengan jumlah guru dianggap memadai apabila mencapai tingkat perbandingan tertentu terhadap murid sedemikian sehingga proses belajar mengajar berjalan efektif. Untuk itu indikator yang sering digunakan untuk melihat tingkat kecukupan sekolah adalah rasio murid-guru dan rasio murid-sekolah.

Daya tampung sekolah SD, SLTP, dan SMA Sederajat dikatakan sudah semakin baik, jika ditandai dengan rasio murid-sekolah yang semakin kecil. Hal ini dikarenakan jumlah murid yang sekolah bertambah lebih sedikit atau sejalan dengan peningkatan jumlah gedung sekolah yang ada.

Begitu juga dengan Rasio murid-guru menggambarkan rata-rata jumlah murid yang diajar oleh seorang guru. Semakin besar rasio, berarti secara rata-rata semakin banyak murid yang diajar oleh seorang guru. Angka rasio semakin kecil maka akan semakin baik pula.

Di tahun 2019, angka rasio Murid-Sekolah Kab. Lahat untuk SD sederajat sebesar 146,27; SMP sederajat sebesar 242,73 dan SMA sederajat 354,05 siswa per

sekolah. Sedangkan Rasio murid guru untuk SD sederajat sebesar 10,43; SMP sederajat sebesar 11,77 dan SMA sederajat 11,95 siswa per guru.

Tabel 5.1.
Rasio Murid-Sekolah dan Rasio Murid-Guru di Kabupaten Lahat
Tahun 2016-2019

Indikator	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Rasio Murid-Sekolah				
- SD/MI	151,09	149,79	153,50	146,27
- SMP/MTs	256,36	249,55	246,30	242,73
- SMA/MA/SMK	332,96	333,28	344,64	354,05
2. Rasio Murid-Guru				
- SD/MI	10,67	10,71	10,76	10,43
- SMP/MTs	10,27	12,74	12,12	11,77
- SMA/MA/SMK	11,00	12,40	7,91	11,95

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat, data diolah

5.2. Partisipasi Sekolah

Pembangunan di bidang pendidikan memerlukan peran serta yang aktif tidak hanya dari pemerintah, tetapi juga dari masyarakat. Untuk melihat seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan yang ada dapat dilihat dari persentase penduduk yang masih bersekolah pada umur tertentu yang lebih dikenal dengan angka partisipasi sekolah. Meningkatnya angka partisipasi sekolah berarti menunjukkan adanya keberhasilan di bidang pendidikan, terutama yang berkaitan dengan upaya memperluas jangkauan pelayanan pendidikan.

5.2.1. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka partisipasi kasar menurut jenjang pendidikan mengukur banyaknya penduduk yang bersekolah dalam suatu jenjang pendidikan dari setiap 100 penduduk usia sekolah. APK untuk Sekolah Dasar tahun 2019 mencapai lebih dari 100 persen

sekitar 111,71 persen. Hal ini dikarenakan adanya anak usia kurang dari 7 tahun telah duduk di bangku SD sederajat atau penduduk usia lebih dari 12 tahun yang masih bersekolah di SD sederajat, sehingga jumlah murid SD sederajat lebih banyak dibanding jumlah penduduk usia 7-12 tahun. Sedangkan untuk tingkat SLTP sederajat pada tahun 2019 APK sebesar 92,07 dan SLTA sederajat sebesar 79,34.

Tabel 5.2.
Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Lahat
Tahun 2016-2019

Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SD/MI	115,21	111,99	116,55	111,71
SMP/MTs	91,15	85,69	91,76	92,07
SMA/MA/SMK	88,09	84,49	81,53	79,34

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah dari data Susenas

5.2.2. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) menurut jenjang pendidikan merupakan perbandingan antara banyaknya murid pada masing-masing jenjang pendidikan dengan jumlah penduduk kelompok umur untuk jenjang pendidikan yang bersangkutan (7-12 untuk SD, 13-15 untuk SMP dan 16-18 untuk SLTA). Karena itu, APM untuk tiap jenjang pendidikan pada umumnya lebih rendah bila dibandingkan dengan angka partisipasi kasar (APK).

Pada tahun 2019 APM Sekolah Dasar sebesar 98,81 persen menunjukkan bahwa hampir semua anak pada kelompok umur 7-12 tahun di Kabupaten Lahat berada pada jenjang pendidikan SD, hanya sebesar 1,19 persen anak pada kelompok umur 7-12 tahun yang tidak berada pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan untuk jenjang SLTP dan SLTA angkanya masing-masing sebesar 87,14 dan 67,21 persen. Rendahnya APM

juga menunjukkan banyaknya murid yang duduk di jenjang pendidikan yang tidak sesuai dengan kelompok usianya.

Tabel 5.3
Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Lahat Tahun 2016-2019

Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019
(1)	(3)	(4)	(5)	
SD/MI	97,64	100,00	98,70	98,81
SMP/MTs	82,97	82,49	87,28	87,14
SMA/MA/SMK	67,65	68,78	68,60	67,21

Sumber : Badan Pusat Statistik

5.2.3. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) menggambarkan secara umum tentang banyaknya anak kelompok umur tertentu yang sedang bersekolah tanpa memperhatikan jenjang pendidikan yang sedang diikuti. Indikator ini sangat relevan untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan program wajib belajar sembilan tahun, yaitu dengan melihat APS penduduk usia 7-12 tahun (usia SD) dan 13-15 tahun (usia SLTP). Dengan adanya program wajib belajar tersebut seharusnya anak-anak usia 7-15 tahun sedang berada di bangku sekolah.

Angka partisipasi sekolah anak-anak usia 7-12 tahun pada tahun 2019 telah mencapai 99,89 persen. Artinya dari setiap 100 orang anak usia 7-12 tahun ada 1 orang anak yang tidak sekolah. Sedangkan untuk kelompok usia 13-15 tahun APS sebesar 95,73 persen. Berarti ada sekitar 4 sampai 5 orang anak usia 13-15 tahun yang tidak sekolah dari setiap 100 anak usia 13-15 tahun. Angka partisipasi sekolah anak-anak usia 16-18 tahun pada tahun 2018 telah mencapai 72,02 persen. Artinya dari setiap 100 orang anak usia 16-18 tahun terdapat sekitar 27 sampai 28 orang anak yang tidak sekolah. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa program wajib belajar 9 tahun belum sepenuhnya berhasil. Namun dibandingkan dengan tahun sebelumnya,

maka partisipasi sekolah penduduk telah meningkat pada jenjang pendidikan sekolah menengah pertama sederajat walau masih mengalami penurunan untuk jenjang sekolah dasar sederajat dan sekolah menengah atas sederajat.

Angka partisipasi sekolah yang semakin kecil dengan meningkatnya kelompok umur, tentunya berkaitan dengan beberapa faktor, seperti adanya tuntutan bagi mereka untuk bekerja. Selain itu jarak sekolah untuk jenjang SLTP dan SLTA yang pada umumnya lebih jauh jangkauannya dari desa tempat tinggal mereka, juga mempengaruhi besarnya angka partisipasi sekolah penduduk. Lebih lengkap perkembangan APS dalam 4 (empat) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 5.4.

Tabel 5.4
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Lahat Tahun 2016-2019

Kelompok Umur (Tahun)	2016	2017	2018	2019
(1)	(3)	(4)	(5)	
7-12	99,53	100,00	100,00	99,89
13-15	95,14	94,26	95,15	95,73
16-18	73,17	72,15	72,02	71,96

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah dari data Susenas

5.3. Tingkat Pendidikan

Gambaran mengenai peningkatan sumber daya manusia dapat dilihat dari kualitas tingkat pendidikan pendudukan usia 15 tahun ke atas. Indikator yang biasa digunakan untuk melihat tingkat pendidikan adalah rata-rata lama sekolah yang secara umum menunjukkan jenjang pendidikan yang telah dicapai oleh penduduk usia 15 tahun keatas. Jika dilihat dari komposisi penduduk usia 15 tahun ke atas menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan bahwa sebagian besar penduduk Kabupaten Lahat pada tahun 2019 adalah tamat SLTA yaitu sebesar 29,79 persen. Disusul dengan tamatan SD sebanyak 25,59 persen. Namun masih terdapat sekitar 17,11 persen penduduk yang tidak tamat SD (termasuk mereka yang tidak pernah sekolah).

Tabel 5.5
Persentase Penduduk Usia 15 tahun Keatas Menurut Pendidikan Tertinggi yang
Ditamatkan Kabupaten Lahat, Tahun 2016-2019

Tahun	Tdk Punya Ijazah SD	SD	SLTP	SLTA	Perguruan Tinggi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2016	13,73	37,59	14,77	27,55	6,36
2017	12,69	27,24	22,49	31,72	5,36
2018	17,20	23,73	23,24	29,73	6,10
2019	17,11	25,59	20,11	29,79	7,41

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah dari data Susenas

<https://lahatkab.bps.go.id>

<https://lahatkab.bps.go.id>

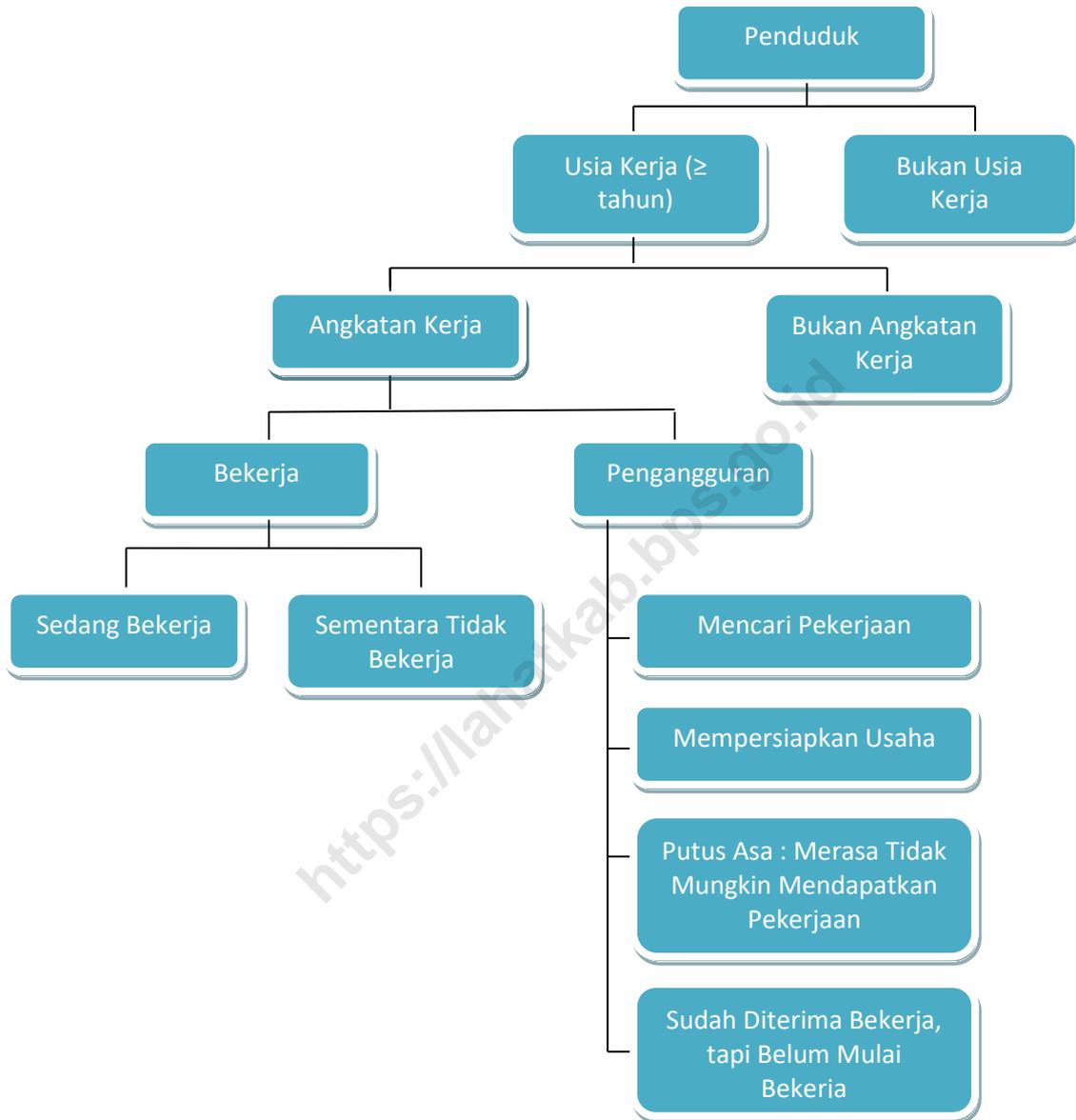
BAB VI KETENAGAKERJAAN

Ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek penting yang menunjukkan kesejahteraan masyarakat dan perkembangan perekonomian suatu daerah. Data dan indikator ketenagakerjaan menggambarkan bagaimana kemampuan perekonomian suatu daerah dalam menyediakan lapangan kerja bagi penduduknya yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan dan penurunan angka kemiskinan. Selain itu, dari data ketenagakerjaan juga dapat menunjukkan struktur perekonomian suatu daerah, dimana hal tersebut merupakan salah satu indikator kemajuan perekonomian daerah tersebut.

Untuk mengetahui bagaimana kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Lahat, pada bab ini akan diuraikan beberapa indikator ketenagakerjaan seperti Tingkat Partisipasi Angkatan kerja (TPAK), angka pengangguran dan distribusi sektoral tenaga kerja. Dalam analisis ini digunakan batasan umur penduduk usia kerja adalah penduduk 15 tahun ke atas, sesuai dengan Konvensi ILO No. 138 yang membatasi usia minimum yang diperbolehkan untuk bekerja adalah 15 tahun ke atas.

Konsep/definisi ketenagakerjaan yang digunakan BPS merujuk pada rekomendasi International Labour Organization (ILO) sebagaimana tercantum dalam buku *“Surveys of Economically Active Population, Employment, Unemployment and Underemployment”* An ILO Manual on Concepts and Methods ILO 1992. Hal ini dimaksudkan terutama agar data ketenagakerjaan yang dihasilkan dari berbagai survei di Indonesia dapat dibandingkan secara internasional, tanpa mengesampingkan kondisi ketenagakerjaan spesifik di Indonesia. Menurut konsep *Labor Force Framework*, penduduk dibagi dalam beberapa kelompok. Kelompok-kelompok tersebut dapat digambarkan dalam Diagram Ketenagakerjaan sebagai berikut:

DIAGRAM KETENAGAKERJAAN



6.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah proporsi penduduk usia kerja yang termasuk dalam angkatan kerja, yakni mereka yang bekerja dan menganggur. Ukuran ini secara kasar dapat menerangkan kecenderungan tenaga kerja untuk aktif bekerja atau mencari kerja yang sifatnya mendatangkan kesempatan berpenghasilan baik berupa uang atau barang. Makin besar angka TPAK mengindikasikan peningkatan

kecenderungan penduduk usia ekonomi aktif untuk memasuki angkatan kerja atau melakukan kegiatan ekonomi. Jumlah penduduk usia kerja, kebutuhan penduduk untuk bekerja, dan berbagai faktor sosial, ekonomi dan demografis merupakan faktor utama yang mempengaruhi angka TPAK.

Tabel 6.1
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Jenis Kelamin
di Kabupaten Lahat Tahun 2016–2019

Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah	
	Laki-laki (%)	Perempuan (%)	L+P (%)	Angkatan Kerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2016*				
2017	85,49	59,47	72,74	266 816
2018	86,27	62,59	74,66	218 800
2019*	86,01	56,03	71,32	

Sumber: BPS, diolah dari data Sakernas

*) Data tahun 2016, 2019 tidak tersedia

TPAK penduduk Lahat pada tahun 2019 mengalami fluktuasi dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu dari 72,74 persen di tahun 2017 menjadi sebesar 71,32 persen. Peningkatan TPAK dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya peningkatan partisipasi sekolah penduduk. Di daerah-daerah dengan struktur perekonomian yang didominasi oleh sektor pertanian, angka TPAK juga erat hubungannya dengan fluktuatifnya kegiatan di bidang pertanian. Bila referensi waktu survei bertepatan dengan pekerjaan yang membutuhkan keterlibatan banyak tenaga kerja seperti pada saat tanam atau panen, maka kecenderungan TPAK menjadi tinggi. Sebaliknya bila referensi waktu survei bertepatan dengan saat menunggu panen misalnya, maka TPAK akan cenderung rendah.

Menelaah masalah TPAK, yang menarik adalah melihat TPAK penduduk perempuan. TPAK laki-laki bersifat universal, karena setiap laki-laki dewasa dituntut untuk mencari nafkah baik bagi dirinya sendiri maupun keluarganya. Sedangkan TPAK

perempuan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain meningkatnya pendidikan perempuan, terbukanya kesempatan kerja bagi perempuan, meningkatnya kebutuhan ekonomi keluarga dan kemajuan sosial ekonomi masyarakat, seperti pandangan terhadap perempuan yang bekerja di luar rumah dan sebagainya. TPAK penduduk perempuan di Kabupaten Lahat pada tahun 2019 sebesar 56,03 persen. Angka tersebut mengalami penurunan sebesar 6,56 persen jika dibanding tahun 2018 yang angkanya sebesar 62,59 persen.

6.2. Pengangguran

Salah satu isu penting dalam ketenagakerjaan, disamping keadaan angkatan kerja (*economically active population*) dan struktur ketenagakerjaan adalah isu pengangguran. Pengangguran dari sisi ekonomi merupakan produk dari ketidakmampuan pasar kerja dalam menyerap angkatan kerja yang tersedia. Ketersediaan lapangan kerja yang relative terbatas tidak mampu menyerap 'para pencari kerja' yang senantiasa bertambah setiap tahun seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Angka pengangguran yang tinggi tidak hanya menimbulkan berbagai masalah di bidang ekonomi saja melainkan juga menimbulkan berbagai masalah di bidang sosial seperti kemiskinan dan kerawanan sosial (BPS, 2009).

6.2.1. Pengangguran Terbuka

Pengangguran terbuka (*open unemployment*) adalah penduduk yang masuk dalam angkatan kerja (15 tahun keatas) yang sedang mencari pekerjaan (belum bekerja), penduduk yang sedang mempersiapkan usaha, penduduk yang merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (putus asa), serta penduduk yang sudah mendapat pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Tabel 6.2
Tingkat Pengangguran Terbuka Penduduk Usia 15 Tahun Keatas
Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Lahat Tahun 2016–2019

Tahun	Jenis Kelamin			Jumlah
	Laki-laki (%)	Perempuan (%)	L+P (%)	Pengangguran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2016*				
2017	4,43	4,16	4,33	9 100
2018	3,31	3,25	3,29	7 189
2019*	3,95	3,14	3,64	

Sumber: BPS, diolah dari data Sakernas.

*) Data tahun 2016, 2019 tidak tersedia

Angka pengangguran terbuka di Kabupaten Lahat berfluktuasi. Pada tahun 2019 sebesar 3,64 persen, angka tersebut lebih rendah dibandingkan tahun 2018 yang angkanya sebesar 3,29 persen dan tahun 2017 sebesar 4,33 persen. Penurunan pada tahun 2017-2018 ini terutama disebabkan oleh angka pengangguran penduduk perempuan, yaitu dari 4,16 persen tahun 2017, 3,25 persen tahun 2018 menjadi 3,14 persen tahun 2019. Demikian juga dengan angka pengangguran pada penduduk laki-laki turun dari 4,43 persen tahun 2017, 3,31 persen tahun 2018 menjadi 3,95 persen tahun 2019. Penurunan ini terjadi diantaranya karena banyaknya perusahaan pertambangan dan angkutan batu bara, selain itu juga menjamurnya warung-warung kecil menjual makanan yang baru berdiri di Kabupaten Lahat sehingga menyerap cukup banyak tenaga kerja dari masyarakat sekitar.

6.2.2. Setengah Pengangguran

Selain pengangguran terbuka, juga dikenal istilah setengah pengangguran (*under unemployment*), yaitu tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal, atau mereka yang sudah bekerja tetapi jam kerjanya kurang dari 35 jam selama seminggu.

Indikator ini menggambarkan tingkat pemanfaatan tenaga kerja yang rendah sekaligus juga menggambarkan rendahnya produktifitas pekerja. Karena meskipun mereka bekerja tetapi belum menggunakan seluruh kapasitas sumber daya yang ada seperti tingkat pendidikan, skill dan keterampilan yang dimiliki atau tidak sesuai dengan jenis pekerjaan yang diharapkan sehingga mereka masih berusaha mendapatkan pekerjaan lain.

Tabel 6.3.
Persentase Penduduk yang Bekerja Kurang dari 35 Jam Seminggu
Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Lahat Tahun 2016–2019

Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki (%)	Perempuan (%)	L+P (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
2016*			
2017	20,74	39,59	28,29
2018	19,43	40,36	26,99
2019	32,93	48,53	38,97

Sumber: BPS, diolah dari data Sakernas.

*) Data tahun 2016 tidak tersedia

BAB VII PERUMAHAN

Data keadaan perumahan sangat penting terutama untuk menggambarkan salah satu dimensi kesejahteraan rumah tangga. Kebutuhan akan perumahan merupakan salah satu kebutuhan pokok setiap orang, selain sandang dan pangan. Dengan kata lain, rumah merupakan kebutuhan primer yang harus dipenuhi. Pada saat ini keberadaan rumah tidak hanya berfungsi sebagai tempat berlindung tetapi sudah menjadi bagian dari gaya hidup atau status symbol bahkan juga menunjukkan identitas pemiliknya.

Beberapa aspek yang dapat digambarkan dari data fasilitas perumahan antara lain adalah adanya kelayakan dan kesehatan rumah yang pada akhirnya mempengaruhi kesehatan masyarakat, tingkat pendapatan dan aspek-aspek lain. Untuk mengetahui bagaimana kondisi perumahan penduduk di Kabupaten Lahat, pada bab ini akan diuraikan beberapa indikator perumahan dan pemukiman seperti kondisi fisik bangunan dan utilitas dan fasilitas tempat tinggal.

7.1. Kondisi Fisik Bangunan

Secara umum, kualitas rumah tinggal menunjukkan tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga, dimana kualitas tersebut ditentukan oleh fisik rumah tersebut yang dapat terlihat dari fasilitas yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Rumah dikatakan layak apabila memiliki dinding, lantai dan atap yang layak. Sementara itu, berbagai fasilitas yang mencerminkan kesejahteraan rumah tangga tersebut diantaranya dapat terlihat dari fasilitas penerangan, sumber air minum dan fasilitas tempat buang air besar. Kualitas perumahan yang baik dan penggunaan fasilitas perumahan yang memadai akan memberikan kenyamanan bagi penghuninya.

7.1.1. Rata-rata Luas Lantai

Rata-rata luas lantai (hunian) per rumah tangga dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi tempat tinggal penduduk. Luas lantai tempat tinggal selain

digunakan sebagai indikator untuk menilai kemampuan sosial ekonomi masyarakat, secara tidak langsung juga dikaitkan dengan sistem kesehatan lingkungan keluarga atau tempat tinggal (pemukiman). Pemerintah mengharapkan satu rumah idealnya ditempati oleh satu rumah tangga itupun dengan jumlah anggota rumah tangga yang tidak terlalu banyak. Luas lantai yang cenderung sempit dianggap kurang sehat, karena rawan terhadap bibit penyakit yang dapat ditularkan kepada sesama anggota rumah tangga. Sehingga dapat dikatakan bahwa semakin luas luas lantai yang dihuni oleh suatu rumah tangga semakin baik kondisi (kesehatan) rumah tangga tersebut. Dilihat dari rata-rata luas lantai per kapita dapat dikatakan bahwa keadaan rumah tempat tinggal penduduk di Kabupaten Lahat pada tahun 2019 sudah cukup baik, dimana hampir 70,37 persen rumah telah mempunyai rata-rata luas lantai per kapita lebih dari 10 m².

Tabel 7.1.
Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator
Kualitas Perumahan di Kabupaten Lahat Tahun 2016-2019

Kualitas Perumahan	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Luas lantai per kapita kurang dari 10 m ²	29,43	30,49	35,60	29,63
2. Lantai Bukan Tanah	99,16	99,08	99,92	99,03
3. Atap Layak	99,37	99,64	100,00	99,99
4. Dinding Permanen	97,16	96,76	97,52	97,50

]

7.1.2. Jenis Atap

Data mengenai jenis atap rumah yang dihuni oleh keluarga dapat digunakan sebagai salah satu petunjuk kondisi bangunan tempat tinggal penduduk. Secara umum, semakin baik kondisi atap tempat tinggal, maka semakin baik kondisi bangunan tempat tinggal secara keseluruhan. Hal tersebut juga mencerminkan semakin baiknya kondisi sosial ekonomi penduduk.

Pada tahun 2019 dilihat dari jenis atapnya, dapat dikatakan bahwa kondisi rumah di Kabupaten Lahat cukup baik, dimana sekitar 99,99 persen bangunan tempat tinggal telah menggunakan atap yang layak (seng, asbes, genteng dan beton). Sedangkan rumah tangga yang menggunakan jenis atap lain seperti daun-daunan persentasenya sangat kecil.

7.1.3. Jenis Dinding

Indikator ini menyajikan proporsi rumah tangga yang menghuni rumah berdinding tembok dan kayu. Semakin tinggi persentase jenis dinding tersebut, cenderung semakin baik kesejahteraan rumah tangga. Seperti kita ketahui bahwa rumah asli masyarakat Sumatera selatan pada umumnya berdinding dari kayu. Namun seiring dengan perkembangan jaman, penggunaan kayu sebagai dinding rumah mulai berkurang dan digantikan oleh dinding tembok/batu bata.

Pada tahun 2019 dilihat dari jenis dinding rumahnya, secara umum kondisi fisik bangunan tempat tinggal di Kabupaten Lahat cukup baik dimana hampir 97,50 persen tempat tinggal berdinding permanen (tembok atau kayu), hanya sebagian kecil yang menggunakan dinding bukan permanen (bambu).

7.1.4. Jenis Lantai

Jenis lantai juga dapat digunakan sebagai indikator untuk melihat kualitas perumahan. Semakin baik kualitas lantai perumahan dapat diasumsikan semakin baik tingkat perekonomian penduduknya. Rumah tangga dengan jenis lantai keramik atau marmer mempunyai tingkat kesejahteraan yang lebih baik dari pada rumah tangga yang mempergunakan jenis lantai semen, ubin atau tanah.

Secara umum kondisi perumahan di Kabupaten Lahat tergolong cukup baik yaitu dengan proporsi rumah tangga yang menghuni rumah berlantai bukan tanah yang cukup besar yaitu 99,03 persen pada tahun 2019. Sementara rumah yang berlantai tanah kurang dari 1 persen.

Dengan tingkat pendapatan yang cukup baik, masyarakat semakin menyadari terhadap kualitas bangunan terutama lantai rumah yang turut mempengaruhi tingkat kesehatan dan kesejahteraan penghuninya. Lantai tanah kemungkinan besar dapat menjadi sarang penyakit karena bibit penyakit menyukai keadaan tanah di dalam rumah yang lembab. Selain itu tingkat kebersihan rumah kurang dapat dijaga.

7.2. Fasilitas Tempat Tinggal

Kelengkapan fasilitas pokok suatu rumah akan menentukan nyaman atau tidaknya suatu tempat tinggal, yang juga menentukan kualitas suatu rumah. Fasilitas pokok yang penting agar suatu rumah menjadi nyaman dan sehat untuk ditinggali adalah tersedianya sarana penerangan listrik, air bersih serta jamban dengan tangki septik.

7.2.1. Sumber Penerangan

Sumber penerangan yang digunakan suatu rumah tangga dapat menggambarkan kondisi sosial ekonomi rumah tangga tersebut. Dengan adanya sumber penerangan listrik rumah tangga tentunya akan semakin mudah untuk mengakses ke media komunikasi, radio, televisi, dan internet, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan masyarakat.

Selain itu, ketersediaan fasilitas listrik selain untuk keperluan penerangan, di sisi lain juga dapat dimanfaatkan untuk pengembangan perekonomian rumah tangga, seperti untuk keperluan industri rumah tangga dan jasa. Hal tersebut akan berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga.

Pada tahun 2019 seluruh rumah tangga di Kabupaten Lahat sudah menggunakan listrik sebagai sumber penerangan baik itu PLN (dengan meteran atau tanpa meteran) maupun listrik non PLN, atau mencapai 100 persen.

7.2.2. Sumber Air Minum

Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Ketersediaan dalam jumlah yang cukup terutama untuk keperluan minum dan masak merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus diupayakan oleh pemerintah. Besar kecilnya persentase penduduk yang menggunakan air bersih dipengaruhi oleh dua faktor yaitu kesadaran penduduk tentang kesehatan dan sanitasi lingkungan serta tersedianya fasilitas air bersih bagi penduduk.

Tabel 7.2.
Persentase Rumah Tangga Menurut Indikator Fasilitas Perumahan
Kabupaten Lahat, Tahun 2016-2019

Fasilitas Perumahan	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Sumber Penerangan Listrik	98,88	99,81	99,28	100,00
2. Air Minum Leding dan air kemasan	12,72	16,42	15,10	22,80
3. Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	54,68	45,83	43,70	48,84
4. Jamban Sendiri dengan Tangki Septik	44,34	43,57	47,75	53,31

Sumber: BPS, diolah dari data Susenas

Pada tahun 2019 sebanyak 48,84 persen rumah tangga di Kabupaten Lahat menggunakan air bersih (air ledeng, air kemasan, air sumur terlindung dan mata air terlindung). Sumber air bersih sebagian besar berasal dari air sumur terlindung dan mata air terlindung. Sedangkan rumah tangga pengguna air bersih dari air ledeng/PDAM dan air kemasan/air mineral sekitar 22,80 persen dari total rumah tangga di daerah ini. Rumah tangga pengguna air minum yang berasal dari ledeng dan air kemasan naik dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

7.2.3. Fasilitas Tempat Pembuangan Kotoran (Jamban)

Sistem pembuangan kotoran/tinja sangat erat kaitannya dengan kondisi lingkungan dan resiko penularan suatu penyakit, seperti penyakit saluran pencernaan. Klasifikasi sarana pembuangan kotoran dilakukann berdasarkan atas tingkat resiko pencemaran yang mungkin ditimbulkan. Fasilitas tempat tinggal yang berkaitan dengan hal tersebut adalah ketersediaan jamban dan penampungan kotoran dengan tangki septik.

Kondisi sistem pembuangan kotoran dari rumah tangga di Kabupaten Lahat masih relatif belum memadai, karena hanya sebagian rumah tangga saja yang menggunakan tanki septik sebagai sarana penampungan kotoran. Pada tahun 2019 rumah tangga di Kabupaten Lahat yang sudah menggunakan jamban sendiri dengan tangki septik adalah sebanyak 53,31 persen.

BAB VIII

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Manusia adalah kekayaan bangsa yg sesungguhnya. Pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan, bukan alat dari pembangunan. Tujuan utama pembangunan adalah menciptakan lingkungan yg memungkinkan rakyat untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yg produktif (UNDP)

IPM adalah indeks yang menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR). IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar:

1. Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*);
2. Pengetahuan (*knowledge*); dan
3. Standar hidup layak (*decent standard of living*)

Beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM. Angka Melek Huruf (AMH) sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena AMH di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik. Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. Kemudian, penggunaan rumus rata-rata aritmatik dalam penghitungan IPM menggambarkan capaian yang rendah di suatu dimensi tertutupi oleh capaian tinggi di dimensi lain, padahal masing-masing dimensi dianggap mempunyai pengaruh yang sama besar dalam pembangunan manusia. Berikut perbedaan penghitungan IPM metode lama dan metode baru:

Grafik 8.1
Perbedaan Penghitungan IPM Metode Lama dan Metode Baru

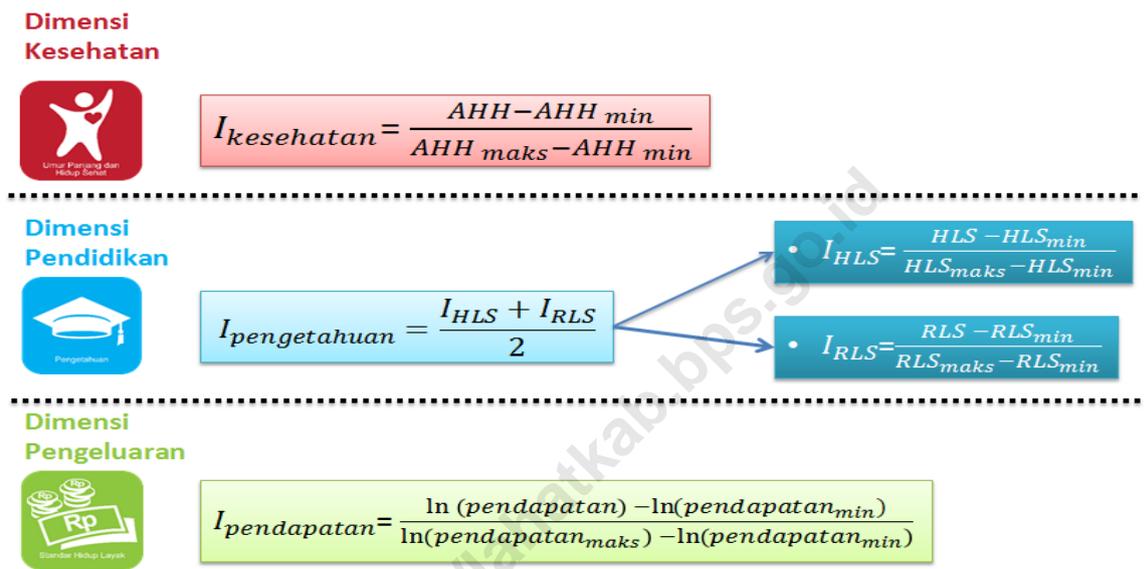
DIMENSI	METODE LAMA	METODE BARU(2014)
Kesehatan	Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)	Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)
Pengetahuan	1. Angka Melek Huruf (AMH)	1. Harapan Lama Sekolah (HLS)
	2. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	2. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
Standar Hidup Layak	Pengeluaran per kapita (Rp)	Pengeluaran per kapita (Rp)
Metode Perhitungan	Rata-rata Hitung $IPM = \frac{1}{3}(I_{kesehatan} + I_{pengetahuan} + I_{pendapatan})$	Rata-rata Ukur $IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pengetahuan} \times I_{pendapatan}}$

8.1 Dimensi Pengukuran IPM Metode Baru

1. **Dimensi umur panjang dan hidup sehat**, indikatornya adalah Angka Harapan Hidup-AHH saat lahir (Life Exepectancy) yaitu rata-rata banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat.
2. **Dimensi pengetahuan**, indikatornya :
 - **Harapan Lama Sekolah-HLS (Expected Years of Schooling-EYS)** yaitu lamanya sekolah(dalam tahun) yg diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang. Angka HLS dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS menggambarkan kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yg ditunjukkan oleh lamanya pendidikan yg diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.
 - **Rata-rata Lama Sekolah-RLS (Mean Years of Schooling-MYS)** yaitu jumlah tahun yg digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Cakupan penduduk yg dihitung adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas.

3. **Dimensi Standar Hidup Layak**, indikatornya adalah *Pengeluaran per Kapita* yg ditentukan dari nilai pengeluaran dan paritas daya beli (Purchasing Power Parity-PPP) dengan menggunakan 66 komoditas makanan dan 30 komoditas non makanan.

Grafik 8.2
Rumus Penghitungan IPM Metode Baru



Pengklasifikasian pembangunan manusia bertujuan untuk mengorganisasikan wilayah-wilayah menjadi kelompok-kelompok yang sama dalam dalam hal pembangunan manusia. Capaian IPM diklasifikasikan menjadi beberapa kategori, yaitu:

Grafik 8.3
Klasifikasi IPM



Untuk mengukur kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu digunakan ukuran pertumbuhan IPM per tahun. Pertumbuhan IPM menunjukkan perbandingan antara capaian yang telah ditempuh dengan capaian sebelumnya. Semakin tinggi nilai pertumbuhan, semakin cepat IPM suatu wilayah untuk mencapai nilai maksimalnya.

$$\text{Pertumbuhan IPM} = \frac{(IPM_t - IPM_{t-1})}{IPM_{t-1}} \times 100$$

Keterangan:

IPM_t : IPM suatu wilayah pada tahun t

IPM_{t-1} : IPM suatu wilayah pada tahun (t-1)

Kesimpulannya, IPM Metode Baru Menggunakan indikator yang lebih tepat, lebih realistis dan dapat membedakan dengan baik (diskriminatif).

- Dengan memasukkan **Rata-rata Lama Sekolah** dan angka **Harapan Lama Sekolah**, bisa didapatkan gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi.
- **PNB** menggantikan **PDB** karena lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.
- Dengan menggunakan **rata-rata geometrik** dalam menyusun IPM dapat diartikan bahwa capaian satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian di dimensi lain. Artinya, untuk mewujudkan pembangunan manusia yang baik, ketiga dimensi harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya.

8.2. Capaian IPM

Angka IPM kurang memiliki makna apabila dalam analisis tidak menyertakan angka IPM tahun sebelumnya atau daerah lain. Untuk melihat tingkat pencapaian pembangunan manusia di Kabupaten Lahat pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 digunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tingkat kabupaten dan kota.

Tabel 8.1.

IPM Kabupaten dan Kota di Sumatera Selatan Tahun 2016-2019

Prov/Kab/Kota	Angka IPM			
	2016	2017	2018	2019
SUMATERA SELATAN	68,24	68,86	69,39	70,02
Ogan Komering Ulu	67,47	68,28	69,01	69,45
Ogan Komering Ilir	65,44	66,11	66,57	66,96
Muara Enim	66,71	67,63	68,28	68,88
Lahat	65,75	66,38	66,99	67,62
Musi Rawas	64,75	65,31	66,18	66,92
Musi Banyuasin	66,45	66,96	67,57	67,83
Banyuasin	65,01	65,85	66,40	66,90
Ogan Komering Ulu Selatan	63,42	63,96	64,84	65,43
Ogan Komering Ulu Timur	67,38	67,84	68,58	69,34
Ogan Ilir	65,45	65,63	66,43	67,22
Empat Lawang	64,00	64,21	64,81	65,10
Penukal Abab Lematang Ilir	61,66	62,58	63,49	64,33
Musi Rawas Utara	63,05	63,18	63,75	64,32
Kota Palembang	76,59	77,22	77,89	78,44
Kota Prabumulih	73,38	73,58	74,04	74,40
Kota Pagar Alam	65,96	66,81	67,62	68,44
Kota Lubuk Linggau	73,17	73,57	73,67	74,81

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan

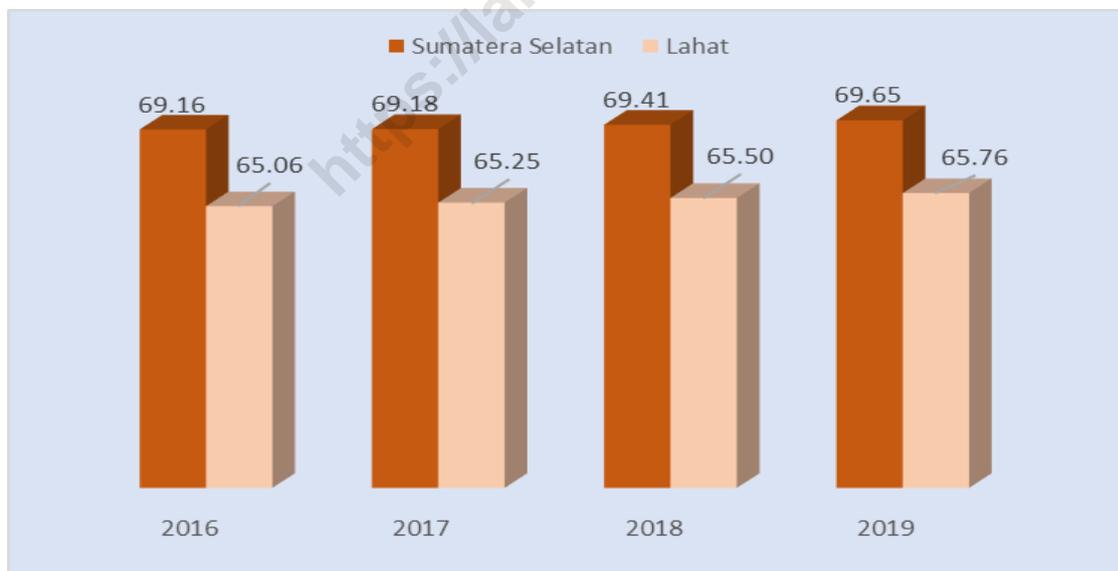
IPM Kabupaten Lahat setiap tahun mengalami peningkatan, tahun 2016 IPM Kabupaten Lahat sebesar 65,75 dan tahun 2017 dan 2018 sebesar 66,38 dan 66,99, kemudian tahun 2019 sebesar 67,62. Namun demikian, capaian IPM Kabupaten Lahat masih dibawah angka IPM Propinsi Sumatera Selatan (70,02 tahun 2019). Jika kita bandingkan dengan IPM kabupaten dan kota di seluruh Provinsi Sumatera Selatan, IPM Kabupaten Lahat pada tahun 2019 berada pada urutan ke-9 (Sembilan).

Kajian pencapaian pembangunan di Kabupaten Lahat tidak dapat dilepaskan dari situasi dan kondisi geografis yang sangat menentukan aksesibilitas penduduk pada pusat pelayanan publik untuk meningkatkan kapabilitas dasar. Dalam hal ini kajian difokuskan pada pencapaian dalam bidang kesehatan dan bidang pendidikan di mana melalui program dari kedua bidang pembangunan tersebut peningkatan kualitas hidup dapat tercapai.

8.2.1. Dimensi Kesehatan

Umur yang lebih panjang memungkinkan manusia sebagai individu mempunyai kesempatan yang lebih banyak untuk terlibat aktif dalam kegiatan pembangunan. Dalam kerangka demikian, maka semakin panjang harapan hidup penduduk selain mencerminkan kualitas hidup yang lebih baik juga mencerminkan lebih besarnya kesempatan untuk memperoleh hidup layak.

Grafik 8.4.
Angka Harapan Hidup Tahun 2016-2019 (Tahun)



Sumber : Badan Pusat Statistik

Angka Harapan Hidup penduduk Kabupaten Lahat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 angka harapan hidup penduduk Kabupaten Lahat adalah 65,06 tahun. Seiring dengan meningkatnya fasilitas dan pelayanan

kesehatan masyarakat, maka angka harapan hidup penduduk terus meningkat. Pada tahun 2019 angka harapan hidup penduduk Kabupaten Lahat meningkat menjadi 65,76 tahun.

Angka Harapan Hidup penduduk Kabupaten Lahat masih lebih rendah dibandingkan rata-rata Angka Harapan Hidup penduduk Sumatera Selatan. Jika dibandingkan dengan rata-rata angka harapan hidup penduduk di Sumatera Selatan tahun 2019 yang sebesar 69,65 tahun maka angka harapan hidup penduduk di Kabupaten Lahat masih perlu ditingkatkan, karena selisih harapan hidup penduduk Kabupaten Lahat dengan rata-rata harapan hidup penduduk Sumatera Selatan mencapai 3,89 tahun. Selisih ini cukup signifikan, karena dalam kondisi sangat sempurna setiap wilayah hanya mampu meningkatkan angka harapan hidup sebesar 1 tahun setiap tahunnya, artinya Pemerintah Kabupaten Lahat akan terus menitikberatkan percepatan pencapaian pembangunan manusia ideal pada komponen angka harapan hidup ini. Percepatan peningkatan angka harapan hidup penduduk Kabupaten Lahat ini akan diupayakan salah satunya melalui peningkatan derajat kesehatan masyarakat, khususnya ibu dan anak, terutama dengan cara mengurangi angka kematian bayi.

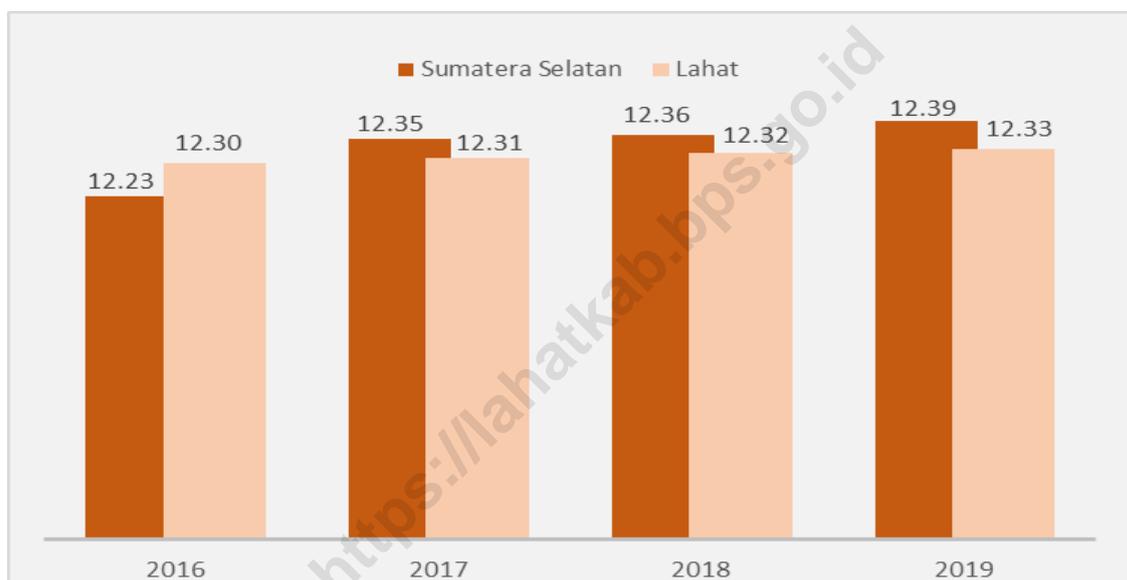
8.2.2. Dimensi Pendidikan

Pembangunan bidang pendidikan merupakan hal yang sangat penting karena merupakan titik awal dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Pentingnya pendidikan sebagai bagian dari pembangunan manusia Indonesia seutuhnya ditunjukkan dengan dijaminnya hak-hak warga negara dalam memperoleh pendidikan. Komitmen diwujudkan dengan program wajib belajar 9 tahun.

Harapan lama sekolah merupakan hal yang diperlukan oleh penduduk agar mempunyai peluang yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Indikator yang dapat memberikan gambaran tentang kualitas penduduk dewasa dalam hal partisipasi sekolah, yang juga dapat memberikan gambaran tentang masalah yang masih dihadapi oleh suatu wilayah.

Harapan lama sekolah dari penduduk Kabupaten Lahat pada tahun 2019 adalah sekitar 12,33 tahun. Hal ini menggambarkan bahwa penduduk Kabupaten Lahat memiliki kemampuan mengenyam pendidikan selama 12 s.d 13 tahun (tamat SMA dan tahun pertama di perguruan tinggi). Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Lahat ini hampir setara dengan angka Harapan Lama Sekolah Di Sumatera Selatan yang hanya sebesar 12,39 tahun.

Grafik 8.5.
Harapan Lama Sekolah Tahun 2016-2019 (Tahun)

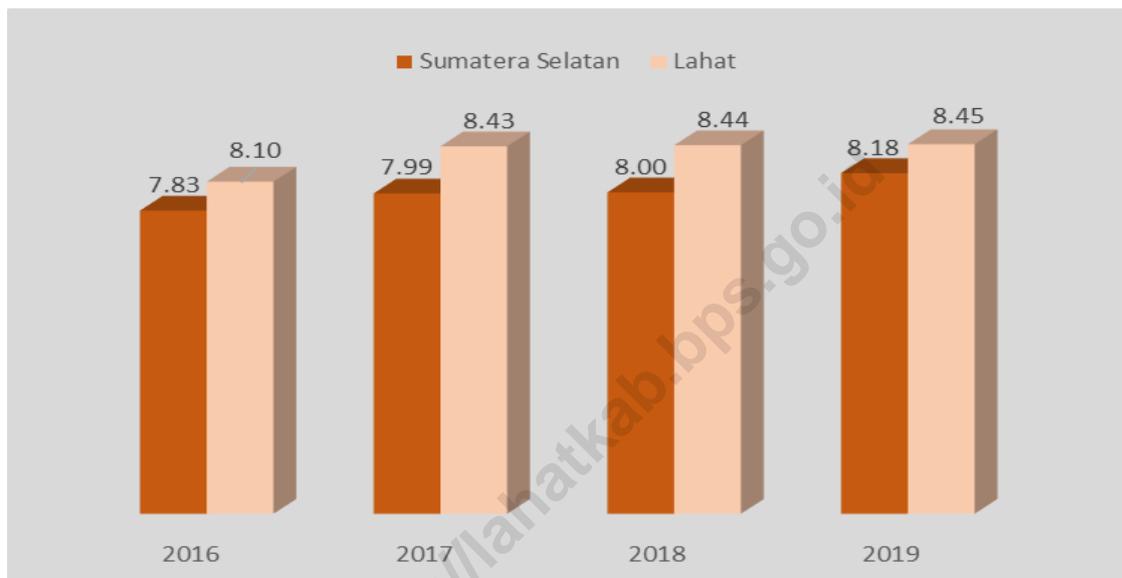


Sumber : Badan Pusat Statistik

Lebih lanjut, secara umum tingkat pendidikan penduduk di suatu wilayah dapat ditunjukkan oleh rata-rata lama sekolah (tahun) yang secara umum menunjukkan pencapaian pendidikan penduduk. Semakin besar angka tersebut berarti semakin tinggi jenjang pendidikan yang dicapai oleh penduduk dan semakin tinggi pula kualitas sumber daya manusia yang dimiliki wilayah tersebut. Pada tahun 2016 rata-rata lama sekolah penduduk dewasa di Kabupaten Lahat adalah 8,10 tahun artinya rata-rata penduduk dewasa di Kabupaten Lahat telah menyelesaikan pendidikan pada kelas 1 sampai dengan kelas 2 SLTP. Angka tersebut terus naik hingga mencapai 8,45 tahun di tahun 2019 (kelas 2- kelas 3 SLTP). Bila dibandingkan dengan angka rata-rata lama sekolah di Provinsi Sumatera Selatan, maka rata-rata

lama sekolah penduduk Lahat masih lebih tinggi. Pada tahun 2019 rata-rata lama sekolah bagi penduduk di Provinsi Sumatera Selatan hanya sebesar 8,18 yang artinya rata-rata lama sekolah penduduk di Provinsi Sumatera Selatan hanya sampai kelas 2 SLTP.

Grafik 8.6.
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun), Tahun 2015-2018



Sumber : Badan Pusat Statistik

8.2.3. Kemampuan Daya Beli Masyarakat

Salah satu indikator yang dapat menggambarkan status pembangunan manusia adalah kemampuan daya beli masyarakat yang tercermin dalam pengeluaran per kapita penduduk.

Grafik 8.7.
Pengeluaran Perkapita Disesuaikan Tahun 2015-2018 (Ribu Rupiah)



Sumber : Badan Pusat Statistik

Pada tahun 2016 pengeluaran perkapita riil masyarakat Kabupaten Lahat Rp. 9 juta perkapita pertahun. Angka tersebut terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya hingga pada tahun 2019 pengeluaran perkapita penduduk sebesar Rp. 10 juta perkapita pertahun. Hal ini menggambarkan meningkatnya daya beli masyarakat Kabupaten Lahat dari tahun ke tahun. Namun selama 4 (empat) tahun terakhir angka pengeluaran perkapita masyarakat Kabupaten Lahat ini masih selalu dibawah rata-rata pengeluaran per kapita Provinsi Sumatera Selatan. Pada tahun 2019 pengeluaran per kapita masyarakat di Sumatera Selatan mencapai 11 juta (10,94 juta).

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<https://lahatkab.bps.go.id>



Badan Pusat Statistik Kabupaten Lahat
Jl. Bandar Jaya Lk. III Lahat
☎ (0731)321416, Fax. (731)321416
E-mail : bps1604@mailhost.bps.go.id